

An aerial night photograph of Makassar, Indonesia, showing city lights and a river. The image is overlaid with large, semi-transparent geometric shapes in shades of blue and white, creating a modern, abstract design.

RENCANA KERJA TAHUN 2023

**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR**



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 2511/050.13/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Agustus 2022
WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 2511/090-13/TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN
2023.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
5.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
6.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
8.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
10.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
11.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
12.	Dinas Sosial Kota Makassar
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
14.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar
15.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
20.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
21.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
22.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
23.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
24.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
25.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
29.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
33.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
34.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
35.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
36.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
37.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
38.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
39.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
40.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
43.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
44.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
45.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
46.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
47.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
48.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
49.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
50.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
51.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar



WALI KOTA MAKASSAR,

[Handwritten Signature]
MOH. RAMDHAN POMANTO



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 72 Telp. / Fax. (0411) 853930 Makassar 90222
Email : disnaker_makassar@gmail.com Homepage : <http://www.makassar.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 343/DISNAKER/560/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

- Menetapkan : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2023 dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2023;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Kota Makassar Tahun 2023 dalam Keputusan Walikota Nomor 2511/050.13/Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2023;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan c konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 dengan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketramigrasian Tahun 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 706);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 773);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2023;

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana pedoman dalam dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 09 Agustus 2022



KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP : 19651210 199112 2 001

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Nomor : 343/DISNAKER/560/VIII/2022 tentang
Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota
Makassar Tahun 2023

RENCANA KERJA TAHUN 2023

**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Rencana Kerja ini substansinya menjabarkan potret permasalahan ketenagakerjaan serta program tahun 2023 yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2023 yang memuat rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 beserta indikator-indikator kinerja program/kegiatan rincian target kinerja berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategik yang

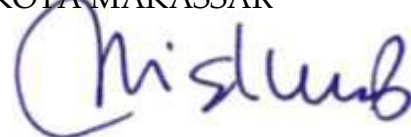
telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarnya.

Untuk tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merencanakan 5 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 20 kegiatan dan 59 subkegiatan untuk mencapai 2 tujuan dan 4 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023, dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 16,399,301,944,- (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Dengan demikian Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemerintah Kota Makassar yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Makassar.

Makassar, Juli 2022

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR



NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc

NIP : 19651210 199112 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	46
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD	49
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022	52
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	58
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	63
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	69
3.3 Program dan Kegiatan	74
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	89
4.1 Rencana Kerja	89
4.2 Pendanaan	95
BAB V. PENUTUP	96
5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran	96
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	97
5.3 Rencana Tindak Lanjut	97
LAMPIRAN : INDIKATOR KINERJA KUNCI	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.01	Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2021	23
Tabel 2.02	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021	25
Tabel 2.03	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan	30
Tabel 2.04	Rata-rata Capaian Kinerja Program Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022	32
Tabel 2.05	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2022	39
Tabel 2.06	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022	47
Tabel 2.07	Analisa SWOT dalam Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	50
Tabel 2.08	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	54
Tabel 2.09	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Makassar	59
Tabel 3.01	Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	68
Tabel 3.02	Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Makassar	70
Tabel 3.03	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional & Provinsi	72
Tabel 3.04	Cascading Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Kota Makassar	73
Tabel 3.05	Rumusan Program Prioritas	76
Tabel 3.06	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah	80
Tabel 3.07	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	83
Tabel 4.01	Proses Bisnis Pencapaian Tujuan Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	107
Tabel 4.02	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	109

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Makassar.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2023 yang memuat Rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Ketenakerjaan Tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan Rencana Kerja Tahun 2022 ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang

- Tata Cara Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketramigrasian Tahun 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 706);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 773);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
 20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
 23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
 24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
 26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai bagian awal dari tahapan pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kota Makassar untuk tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Tahun 2023 memuat rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 beserta rencana anggaran serta

indikator pencapaian Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

1.3.1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 adalah untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023 ke dalam program dan kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
4. Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2023 nantinya dapat terlaksana secara lebih terarah berdasarkan Indikator Capaian Program/Kegiatan yang akan/telah disusun sebelumnya.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 bertujuan agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan urutan sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat

Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan capaian sampai dengan triwulan I tahun 2022 , mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ketenagakerjaan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU dan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Ketenagakerjaan

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Dinas Ketenagakerjaan
- Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah melalui Musrenbang Kota dan Pokok Pikiran (POKIR).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketenagakerjaan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB 2

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (sampai dengan triwulan I Tahun 2022) serta capaian pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Makassar. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan hasil akhir yang akan dicapai. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 tercermin sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu: 1). Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; 2). Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja; 3). Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan tahun anggaran 2021 direncanakan dalam 5 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 51 subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 18.052.000.000,-.

Sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai disusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 lebih memuat berbagai perubahan pergeseran anggaran tanpa penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Secara ringkas dari total 51 subkegiatan, terdapat 19 subkegiatan (37,25%) tidak mengalami perubahan, dan sebanyak 32 subkegiatan (62,75%) mengalami perubahan (28 kegiatan mengalami pengurangan dan 4 kegiatan mengalami penambahan) di Perubahan RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021. Dimana berdasarkan RENJA Tahun 2021 pagu Indikatif sebesar Rp. 18.049.000.000,- (delapan belas milyar empat puluh sembilan juta rupiah), sedangkan pada Perubahan RENJA Pagu Indikatif sebesar Rp. 16.214.889.151,- (enam belas milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah), berkurang sebanyak Rp. 1.837.110.849,00,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau berkurang 10,18 persen.

Adapun rincian perubahan anggaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 direncanakan melaksanakan 8 (delapan) kegiatan dan 28 (duapuluh delapan) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 11.202.378.200,- (sebelas milyar dua ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi 8 (delapan) kegiatan dan 27 (duapuluh

- tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 9.130.348.820,- (sembilan milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau berkurang 18,50 persen (Rp. 2.072.029.380,-);
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada tahun 2021 direncanakan melaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 82.468.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi Rp. 46.860.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh rupiah) atau berkurang 43,18 persen (Rp.35.608.000,-);
 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2021 direncanakan melaksanakan 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 4.584.754.150,- (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi Rp. 4.206.816.650,- (empat milyar dua ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau berkurang 8,24 persen (Rp. 377.937.500,-);
 4. Program Penempatan Tenaga Kerja pada tahun 2021 direncanakan melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.413.880.450,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi Rp. 2.195.572.481,- (dua milyar seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) atau bertambah 55,29 persen (Rp. 781.692.031,-);
 5. Program Hubungan Industrial pada tahun 2021 direncanakan melaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 768.519.200,- (tujuh ratus enam puluh

delapan juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah). Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi Rp. 635.291.200,- (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau berkurang 17,34 persen (Rp. 133.228.000,-).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan pada di tahun 2021 sebesar Rp. 14.064.482.728,- (empat belas milyar enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua belas delapan rupiah) atau sebesar 86,44 persen.

Realisasi capaian target kinerja 5 program tahun 2021 yaitu 2 (dua) program capaian berkinerja sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$); 2 (dua) program capaian berkinerja tinggi ($76\% \leq 90\%$) dan 1 (satu) program capaian berkinerja sedang ($66\% \leq 75\%$).

Adapun realisasi program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
Indeks Kepuasan ASN-PD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, & Keuangan)	90%	90%	88,50%	98,33%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%	90%	65%	72,22%
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%	90%	90%	100%

Rata-rata capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 85,88 persen atau kategori berkinerja tinggi. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut :

- Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100 persen atau dengan capaian sebesar 100 persen;

- Dari target 90 persen Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, Dan Keuangan) terealisasi sebesar 88,50 persen atau dengan capaian sebesar 98,33 persen;
- Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 65 persen atau dengan capaian sebesar 72,22 persen;
- Dari target 90 persen Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 90 persen atau dengan capaian sebesar 100 persen.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 9.185.348.820,- (sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.680.154.223,- (delapan milyar enam ratus delapan puluh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 94,50 persen.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami refocusing sehingga tidak ada anggaran untuk memberikan pelatihan bagi ASN.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Ketersediaan anggaran;
- b. Komitmen pimpinan dan ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan untuk menunjang mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	0%	50%	50%	100%

Dimana tahun 2021 rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 persen dengan rincian sebagai berikut :

- Dari target 50 persen Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun terealisasi sebesar 50 persen atau dengan capaian sebesar 100 persen.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 44.136.000,- (empat puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 43.887.600,- (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 93,66 persen.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Beberapa item rincian anggaran tidak dicairkan dalam rangka efisiensi akan tetapi tidak mengganggu pelaksanaan subkegiatan.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

a. Terbentuknya Forum HRD.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
- b. Lebih melibatkan Forum HRD yang sudah di bentuk dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
- c. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro pada tahun 2022 akan melibatkan semua unsur yang berkentingan dalam bidang Ketenagakerjaan.

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	100%	90%	90,25%	100,27%
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	90%	80%	57,40%	71,76%

Dimana tahun 2021 rata-rata capaian kinerja program sebesar 86,02 persen dengan rincian sebagai berikut :

- Dari target 90 persen Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat terealisasi sebesar 90,25 persen atau dengan capaian sebesar 100,27 persen dimana dari 687 orang orang yang mendaftar sebanyak 620 orang yang mendapatkan pelatihan;
- Dari target 80 persen Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi terealisasi sebesar 57,40 persen atau dengan capaian sebesar 71,76 persen dimana dari 601 orang orang yang mendaftar sebanyak 345 orang yang mendapatkan pelatihan.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 4.206.816.650,- (empat milyar dua ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.772.050.104,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu seratus empat rupiah) atau sebesar 89,67 persen.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;
- b. Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar;
- c. Subkegiatan yang mendukung Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi mengalami refofusing sehingga dari target awal sebanyak 560 orang menjadi 345 orang.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya LPK binaan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pelatihan;
- b. Adanya Program Skill Development Center yang di gagas oleh Badan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
- c. Kerjasama dengan BLK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Melakukan evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan;
- b. Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan;
- c. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
- d. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna;
- e. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	100%	50%	50,23%	100,47%

Dimana tahun 2021 rata-rata capaian kinerja program sebesar 100,47 persen dengan rincian sebagai berikut :

- Dari target 50 persen Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan terealisasi sebesar 50,23 persen atau dengan capaian sebesar 100,47 persen. Dimana dari 4.907 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 2.465 orang.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.195.572.481,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

964.127.023,- (sembilan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 43,91 persen.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Subkegiatan Job Fair/Bursa Kerja tidak dapat dilaksanakan karena tidak terbitnya persetujuan Surat Permintaan Dana (SPD) beberapa rincian belanja penting dalam pelaksanaan kegiatan sehingga secara keseluruhan kegiatan Job Fair tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan diketahui Job Fair merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pencapaian penempatan tenaga kerja;
- b. Pada subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dari 4 lokasi padat karya infrastruktur yang dapat dilaksanakan hanya 1 (satu lokasi) dikarenakan keterlambatan proses tender dan faktor cuaca;
- c. Resesi ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan menahan ekspansi, sehingga lowongan pekerjaan mengalami penurunan. Sedangkan jumlah pencari kerja mengalami penambahan dari pencari kerja baru ataupun tenaga kerja yang terkena dampak PHK;
- d. Masih terbatasnya PNS pejabat fungsional pengantar kerja (1 orang pejabat fungsional);
- e. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
- f. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Melakukan jemput bola dengan lowongan pekerjaan di perusahaan;

- b. MoU dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin, Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK);
- c. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja melalui aplikasi Info Kerja Makassar yang dapat di unduh pada google playstore.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Akan membentuk regulasi tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja dan penggunaan tenaga kerja local;
- b. Akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan mengoptimalkan kegiatan pelayanan Penempatan Tenaga kerja;
- c. Penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Angka sengketa perusahaan-pekerja pertahun	100%	2,5%	3,87%	45,34%
Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	90%	70%	78,30%	111,86%

Dimana tahun 2021 rata-rata capaian kinerja program sebesar 78,60 persen dengan rincian sebagai berikut :

- Dari target 2,50 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun terealisasi sebesar 3,87 persen atau dengan capaian sebesar 45,34 persen. Dimana dari 5.483 perusahaan terdapat 212 kasus yang dilaporkan. Perlu diketahui indikator ini bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya ;
- Dari target 70 Persen Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 78,30 persen atau

dengan capaian sebesar 111,86 persen. Dimana dari 212 kasus yang dilaporkan sebanyak 166 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Sedangkan sebanyak 40 kasus diselesaikan dengan anjuran dan sebanyak 6 kasus masih dalam proses mediasi.

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 635.291.200,- (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 604.263.778,- (enam ratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 95,12 persen.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Hubungan Industrial tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi. Hal ini menyebabkan angka sengketa hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja masih tinggi;
- b. Selain itu, dalam penyelesaian kasus hubungan industrial terjadi peningkatan dengan anjuran (tidak terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pekerja yang bersengketa) sehingga kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mengalami penurunan;
- c. Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator.

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Hubungan Industrial tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya LKS Tripartit yang setiap bulan melakukan rapat kerja terkait isu-isu Ketenagakerjaan;
- b. Terbentuknya Dewan Pengupahan.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
- b. Penambahan Pejabat Fungsional Mediator.

Secara keseluruhan pelaksanaan dari 27 (duapuluh tujuh) subkegiatan terdapat 1 (satu) subkegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu subkegiatan Job Fair/Bursa Kerja dan 1 (satu) subkegiatan dengan capaian kinerja dibawah 70 persen yaitu subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dimana dari 4 lokasi padat karya infrastruktur yang dapat dilaksanakan hanya 1 (satu lokasi).

Sedangkan target dan realisasi anggaran per program yang telah dicapai di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Realisasi Anggaran Per Program
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.130.348.820	8.680.154.223	94,50%
2	Perencanaan Tenaga Kerja	46.860.000	43.887.600	93,66%
3	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.206.816.650	3.772.050.104	89,67%
4	Penempatan Tenaga Kerja	2.195.572.481	964.127.023	43,91%

5	Hubungan Industrial	635.291.200	604.263.778	95,12%
	TOTAL	16.269.889.151	14.064.482.728	86,44%

Untuk lebih lengkapnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2 sesuai format Formulir Tabel T-C.29 di bawah ini :

TABEL 2.2 (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1				2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2				URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
2	2.07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH					100%	9.185.348.820	25,00%	1.614.784.355	25,00%	2.673.013.553	100%	9.185.348.820	100,00%	8.680.154.223	100,00%	94,50%
					INDEKS KEPUASAN ASN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN (KEPEGAWAIAAN, PERLENGKAPAN, DAN KEUANGAN)					90%		0,00%			0,00%		90%		88,50%		98,33%	
					PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS					90%		0,00%			0,00%		90%		65,00%		72,22%	
					PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK					90%		0,00%			20,00%		90%		90,00%		100,00%	
2	2.07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat				11 Dok	128.638.000	3	14.000.000	1	27.025.000	11 Dok	128.638.000	11	115.667.600	100,00%	89,92%	
2	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah				2 Dok	69.599.000	1	14.000.000	1	27.025.000	2 Dok	69.599.000	2	60.888.200	100,00%	87,48%	
					Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah					1 Dok		0	0	0	1 Dok		1	100,00%				
2	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dok	11.034.000	0	0	0	1 Dok	11.034.000	1	10.967.800	100,00%	99,40%		
2	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dok	10.329.000	0	0	0	1 Dok	10.329.000	1	10.262.800	100,00%	99,36%		
2	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dok	8.717.000	0	0	0	1 Dok	8.717.000	1	8.298.700	100,00%	95,20%		
2	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dok	8.552.000	0	0	0	1 Dok	8.552.000	1	8.448.700	100,00%	98,79%		
2	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah				1 Dok	11.384.000	1	0	0	1 Dok	11.384.000	1	8.059.200	100,00%	70,79%		
					Jumlah Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah					1 Dok		1	0	0	1 Dok		1	100,00%				
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah				1 Dok	9.023.000	0	0	0	1 Dok	9.023.000	1	8.742.200	100,00%	96,89%		
					Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP Perangkat Daerah					1 Dok		0	0	0	1 Dok		1	100,00%				
2	2.07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang				12 Bulan	7.650.632.949	3	1.489.562.736	3	2.362.989.354	12 Bulan	7.650.632.949	12	7.385.768.206	100,00%	96,54%	
2	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	7.308.872.949	3	1.451.102.736	3	2.275.109.354	12 Bulan	7.308.872.949	12	7.068.588.206	100,00%	96,71%	
2	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan				12 Bulan	245.760.000	3	22.460.000	3	55.880.000	12 Bulan	245.760.000	12	221.180.000	100,00%	90,00%	
2	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	96.000.000	3	16.000.000	3	32.000.000	12 Bulan	96.000.000	12	96.000.000	100,00%	100,00%	
2	2.07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun				12 Bulan	103.752.800	3	9.000.000	3	30.000.000	12 Bulan	103.752.800	12	89.027.760	100,00%	85,81%	
2	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Pengamanan Gedung Kantor				12 Bulan	41.720.400	3	0	3	12.000.000	12 Bulan	41.720.400	12	27.578.784	100,00%	66,10%	

2	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah					12 Bulan	62.032.400	3	9.000.000	3	18.000.000	12 Bulan	62.032.400	12	61.448.976	100,00%	99,06%
2	2.07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2 Jenis	126.621.400	1	9.000.000	0	18.000.000	2 Jenis	126.621.400	2	125.101.976	100,00%	98,80%
2	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya					108 Psg	64.800.000	0	0	0	0	108 Psg	64.800.000	108	63.986.000	100,00%	98,74%
2	2.07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					12 Bulan	61.821.400	3	9.000.000	3	18.000.000	12 Bulan	61.821.400	12	61.115.976	100,00%	98,86%
2	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan					0 orang	0	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia					8 Jenis	318.509.382	1	3.200.000	2	19.149.200	8 Jenis	318.509.382	8	267.036.426	100,00%	83,84%
2	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan					8 Jenis	14.299.750	0	0	0	0	8 Jenis	14.299.750	8	12.840.000	100,00%	89,79%
2	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor					12 Bulan	84.654.632	3	0	3	0	12 Bulan	84.654.632	12	69.164.500	100,00%	81,70%
2	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak					4 Jenis	17.190.000	0	0	0	0	4 Jenis	17.190.000	4	16.450.000	100,00%	95,70%
2	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan					12 Bulan	19.500.000	3	3.200.000	3	3.600.000	12 Bulan	19.500.000	12	14.400.000	100,00%	73,85%
2	2.07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu					12 Bulan	72.865.000	3	0	3	0	12 Bulan	72.865.000	12	57.465.026	100,00%	78,87%
2	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah					12 Bulan	110.000.000	3	0	3	15.549.200	12 Bulan	110.000.000	12	96.716.900	100,00%	87,92%
2	2.07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD					4 Unit	68.042.269	0	0	1	43.000.000	4 Unit	68.042.269	4	56.548.000	100,00%	83,11%
2	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mesin Fotocopy					1 Unit		0		1		1 Unit		1		100,00%	
						Jumlah Pengadaan AC					1 Unit	68.042.269	0		0		1 Unit	68.042.269	1	56.548.000	100,00%	83,11%
						Jumlah Pengadaan Hardisk External					1 Unit		0		0		1 Unit		1		100,00%	
						Jumlah Pengadaan Printer					1 Unit		0		0		1 Unit		1		100,00%	
2	2.07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang					3 Jenis	486.462.220	3	71.593.519	0	102.008.749	3 Jenis	486.462.220	3	379.276.839	100,00%	77,97%
2	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan					12 Bulan	147.740.600	3	21.000.000	3	42.000.000	12 Bulan	147.740.600	12	146.093.744	100,00%	98,89%
2	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 Bulan	263.544.020	3	34.593.519	3	40.008.749	12 Bulan	263.544.020	12	158.651.095	100,00%	60,20%
2	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan					12 Bulan		3	16.000.000	3	20.000.000	12 Bulan		12		100,00%	
						Jumlah Penyediaan Kebersihan Kantor					12 Bulan	75.177.600	3		3		12 Bulan	75.177.600	12	74.532.000	100,00%	99,14%
2	2.07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah					4 Jenis	302.689.800	4	18.428.100	0	70.841.250	4 Jenis	302.689.800	4	261.727.416	100,00%	86,47%
2	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala					1 Unit	30.324.000	1	3.496.000	0	7.564.000	1 Unit	30.324.000	1	27.273.200	100,00%	89,94%
2	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala					1 Unit		1		0		1 Unit		1		100,00%	
						Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala					6 Unit	238.445.800	6	14.932.100	0	63.277.250	6 Unit	238.445.800	6	202.254.216	100,00%	84,82%
						Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala					7 Unit		7		0		7 Unit		7		100,00%	

2	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala	15 Unit	33.920.000	0	0	5	0	15 Unit	33.920.000	15	32.200.000	100,00%	94,93%
					Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala	5 Unit			0	0	0	0	5 Unit		5		100,00%	
					Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala	8 Unit			0	0	0	0	8 Unit		8		100,00%	
2	2.07	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN	50%	46.860.000	0,00%	0	0,00%	0	50%	46.860.000	50,00%	43.887.600	100,00%	93,66%
2	2.07	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	1 Dok	46.860.000	0	0	0	0	1 Dok	46.860.000	1	43.887.600	100,00%	93,66%
2	2.07	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	50 Orang	46.860.000	0	0	0	0	50 Orang	46.860.000	50	43.887.600	100,00%	93,66%
2	2.07	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT	90%	4.206.816.650	0,00%	21.000.000	0,00%	42.000.000	90%	4.206.816.650	90,25%	3.772.050.104	100,27%	89,67%
						PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	80%		0,00%		0,00%		80%		57,40%		71,76%	
2	2.07	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	620 Orang	3.433.153.050	0	0	0	0	620 Orang	3.433.153.050	620	3.060.215.840	100,00%	89,14%
2	2.07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	620 Orang	3.178.930.050	0	0	0	0	620 Orang	3.178.930.050	620	2.813.233.040	100,00%	88,50%
2	2.07	3	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	240 Orang	254.223.000	0	0	0	0	240 Orang	254.223.000	240	246.982.800	100,00%	97,15%
2	2.07	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan	75 LPK	94.622.000	0	0	0	0	75 LPK	94.622.000	75	91.458.400	100,00%	96,66%
2	2.07	3	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	6 Kali	94.622.000	0	0	0	0	6 Kali	94.622.000	6	91.458.400	100,00%	96,66%
						Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Lembaga Pelatihan swasta (LPK)	75 Orang		0	0	0	0	75 Orang		75		100,00%	
2	2.07	3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran	12 Bulan	234.161.600	3	21.000.000	3	42.000.000	12 Bulan	234.161.600	12	225.355.264	100,00%	96,24%
2	2.07	3	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluhan Standar Mutu dan Tata Kelola LPK	75 Orang	234.161.600	0	21.000.000	0	42.000.000	75 Orang	234.161.600	75	225.355.264	100,00%	96,24%
						Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi yang disediakan	12 Bulan		3	3	3	12 Bulan		12		100,00%		
2	2.07	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas	150 Prshn	150.846.000	0	0	0	0	150 Prshn	150.846.000	150	114.152.000	100,00%	75,67%
2	2.07	3	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Pembinaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil yang dilaksanakan	150 Orang	150.846.000	0	0	0	0	150 Orang	150.846.000	150	114.152.000	100,00%	75,67%
2	2.07	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	100 Prshn	294.034.000	0	0	0	0	100 Prshn	294.034.000	45	280.868.600	45,00%	95,52%
2	2.07	3	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	25 Prshn		0		0		25 Prshn		25		100,00%	
						Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing	20 Orang	294.034.000	0	0	0	0	20 Orang	294.034.000	20	280.868.600	100,00%	95,52%
						Jumlah Peserta Pelatihan Matematika	0 Orang		0		0		0 Orang		0		0,00%	
						Jumlah Seleksi Pemagangan	0 Keg		0		0		0 Keg		0		0,00%	
2	2.07	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	50%	2.195.572.481	46,09%	60.186.460	54,37%	119.194.775	50%	2.195.572.481	50,23%	964.127.023	100,47%	43,91%
2	2.07	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar	12 Bulan	1.685.374.331	3	19.707.500	3	39.241.146	12 Bulan	1.685.374.331	12	620.291.758	100,00%	36,80%
2	2.07	4	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	1 Dok	178.408.800	0	19.707.500	0	39.241.146	1 Dok	178.408.800	1	150.046.098	100,00%	84,10%

						Jumlah Pelayanan Antar Kerja				12 Bulan		3		3		12 Bulan		12		100,00%	
2	2.07	4	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta FGD Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				100 Orang	47.503.000	0	0	0	-	100 Orang	47.503.000	100	47.319.500	100,00%	99,61%
2	2.07	4	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri				40 Orang	1.459.462.531	0	0	0	0	40 Orang	1.459.462.531	40	422.926.160	100,00%	28,98%
						Jumlah Lokasi Padat Karya Infrastruktur				4 Lokasi					0	4 Lokasi		1		25,00%	
2	2.07	4	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS				12 Bulan	72.905.400	3	9.000.000	3	18.000.000	12 Bulan	72.905.400	12	72.185.676	100,00%	99,01%
2	2.07	4	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan				12 Bulan	61.041.400	3	9.000.000	3	18.000.000	12 Bulan	61.041.400	12	60.598.176	100,00%	99,27%
2	2.07	4	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				4 Keg	11.864.000	0	0	0	0	4 Keg	11.864.000	4	11.587.500	100,00%	97,67%
2	2.07	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola				12.000 Loker	373.368.500	1.864	31.478.960	5.124	61.953.629	12.000 Loker	373.368.500	9.627	232.009.589	80,23%	62,14%
2	2.07	4	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Bulan	23.232.000	3	1.478.960	3	1.953.629	12 Bulan	23.232.000	12	7.438.089	100,00%	32,02%
2	2.07	4	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				12 Bulan	225.794.500	3	30.000.000	3	60.000.000	12 Bulan	225.794.500	12	224.571.500	100,00%	99,46%
2	2.07	4	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja				1 Kali	124.342.000	0	0	0	0	1 Kali	124.342.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi pembekalan pelatihan				20 Orang	63.924.250	0	0	0	0	20 Orang	63.924.250	0	39.640.000	0,00%	62,01%
2	2.07	4	2.04	01	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan)				20 Orang	63.924.250	0	0	0	0	20 Orang	63.924.250	20	39.640.000	100,00%	62,01%
						Jumlah Fasilitas Penjemputan PMI yang dipulangkan/deportasi				4 Kali		0	0	0	0	4 Kali		2		50,00%	
2	2.07	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN				2,50%	635.291.200	0,00%	27.000.000	0,00%	108.600.000	2,50%	635.291.200	3,87%	604.263.778	45,34%	95,12%
						PERSENTASE KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)				70,00%		59,52%		76,12%		70,00%		78,30%		111,86%	
2	2.07	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan pelayanan Pendaftaran PKB				12 Bulan	253.240.000	3	0	3	12.000.000	12 Bulan	253.240.000	12	233.382.350	100,00%	92,16%
2	2.07	5	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Outsourcing dan Pemborongan				60 Prshn	48.739.000	0	0	0	0	60 Prshn	48.739.000	60	44.443.750	100,00%	91,19%
						Jumlah Pembinaan PKWT				50 Prshn		0	0	0	0	50 Prshn		50		100,00%	
2	2.07	5	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pembinaan dan Pemantauan PP/PKB (Pembinaan PP/PKB)				2 Kali	26.759.000	0	0	0	0	2 Kali	26.759.000	2	25.912.900	100,00%	96,84%
2	2.07	5	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				4 Triwln	177.742.000	1	0	1	12.000.000	4 Triwln	177.742.000	4	163.025.700	100,00%	91,72%
						Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Upah Minimum Kota				4 Triwln		1	0	1		4 Triwln		4		100,00%	
						Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)				1 UMK		0	0	0		1 UMK		1		100,00%	
2	2.07	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan				12 Bulan	382.051.200	3	27.000.000	3	96.600.000	12 Bulan	382.051.200	12	370.881.428	100,00%	97,08%

2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dialog Ketenagakerjaan (Mayday)				2 Keg	24.082.000	0	0	0	2 Keg	24.082.000	2	22.500.000	100,00%	93,43%
						Jumlah Penetapan Upah Minimum Kota				2 Keg		0	0	0	2 Keg		2		100,00%	
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan mediasi pengaduan perselisihan hubungan industrial				12 Bulan	187.383.200	3	3	54.000.000	12 Bulan	187.383.200	12	184.809.528	100,00%	98,63%
						Jumlah Peserta Temu Teknis Penegakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				50 orang		0	0		50 orang		50		100,00%	
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Tujangan Hari Raya (THR)				1 Keg	11.018.000	0	1	9.600.000	1 Keg	11.018.000	1	10.900.000	100,00%	98,93%
						Jumlah Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				50 Prshn		0	0		50 Prshn		50		100,00%	
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS yang dilaksanakan				12 Kali	159.568.000	3	0	33.000.000	12 Kali	159.568.000	12	152.671.900	100,00%	

Makassar, Desember 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH. M. AP.
Nip. 19651210 199112 2 001

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

Arah kebijakan dan strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tahun 2022-2026 disusun untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Sombere Dan Smart City Dengan Imunitas Kuat Untuk Semua” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan serta upaya dalam pencapaian Misi 2 (kedua) Kota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua” pada tujuan 2.2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru. Arah kebijakan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas RPJMD 2022-2026 Kota Makassar yang mencakup bidang ketenagakerjaan

Di tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berkontribusi dalam pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah pada poin 2). Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa serta poin (3). Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Tahun 2022

Tujuan 1 : Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru		
Indikator Tujuan : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		59,52%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1.1. Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	1.1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	87,07 %
	1.1.2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,00 %

Tujuan 2 : Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif		
Indikator Tujuan : Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahun		4,81%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
2.1. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	2.1.1. Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahun	4,81%
Tujuan 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan		
Indikator Tujuan : Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		46,00%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
3.1. Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	1.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00%
	1.1.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	79,00%

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 direncanakan dalam 5 Program terdiri dari 4 Program Urusan Wajib (2 Program Prioritas dan 2 Program Utama) dan 1 Program Penunjang yang dijabarkan dalam 20 Kegiatan terdiri dari 8 kegiatan penunjang dan 12 kegiatan urusan wajib;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2022, adalah : Rp. 20.003.780.000,- (dua puluh milyar tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana dari usulan hasil

tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar sebanyak 2 (dua) usulan kegiatan yang terakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 2 usulan kegiatan.

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar Rp. 1.642.231.972,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 8,21 persen.

Realisasi capaian target kinerja 5 program sampai dengan triwulan I tahun 2022 yaitu 2 program capaian kinerja di atas 10 persen dan 3 program capaian kinerja masih dibawah 10 persen.

Secara umum, penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 5 program adalah hampir semua kegiatan belum waktunya dilaksanakan, keterlambatan pengesahan DPA Tahun 2022 dan terlambatnya tender pengadaan Makan Minum. Adapun rata-rata capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022

Program/Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00%	20,00%	22,22%
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	25,00%	25,00%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00%	20,00%	22,22%
Program Perencanaan Tenaga Kerja			
Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	93,55%	0,00%	0,00%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,58%	0,00%	0,00%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,00%	0,00%	0,00%
Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.060 Orang	0 Orang	0,00%

Program Penempatan Tenaga Kerja				
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	55,00%	46,09%	61,45%	
Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	8.200 Peluang Kerja	387 Peluang Kerja	0,84%	
Program Hubungan Industrial				
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	29,84%	0,00%	0,00%	
Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja (Pertahun)	4,81%	0,00%	0,00%	
Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	69,00%	59,52	66,88%	

Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi s/d Tri. I	% Capaian
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%	90%	20%	22,22%
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	25%	25,00%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	65%	90%	20%	22,22%

Adapun analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebagai berikut :

- Dari target 90 persen Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 20 persen;
- Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 25 persen;
- Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 20 persen;

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh

tiga) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 11.077.883.100,- (sebelas milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.381.260.972,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 12,47 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Makan Minum masih dalam proses Penentuan Pemenang Tender;
- b. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan anggaran kegiatan dalam proses pencairan.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi s/d Tri. I	% Capaian
Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	0,00%	93,55%	0,00%	0,00%

Dimana sampai dengan Triwulan I tahun 2022 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 93,55 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja terealisasi sebesar 0 persen.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 440.772.000,- (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 0,- (0) atau sebesar 0 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan di triwulan III.

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi s/d Tri. I	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,40%	0,58%	0,00%	0,00%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20,50%	21,00%	0,00%	0,00%
Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	630 Orang	1.060 Orang	0 Orang	0,00%

Dimana sampai dengan Triwulan I tahun 2022 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 0,58 persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi terealisasi sebesar 0 persen;
- Dari target 21 persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 0 persen;
- Dari 1.060 Orang Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan terealisasi sebesar 0 persen.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 3.773.340.150,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 0,83 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan pelatihan masih menunggu pemenang tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pemenang tender pengadaan makan minum;
- Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Instruktur;
- Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi s/d Tri. I	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	50,23%	55,00%	46,09%	83,80
Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	6.405 Peluang Kerja	8.200 Peluang Kerja	387	4,72%

Dimana sampai dengan Triwulan I tahun 2022 target capaian kinerja program sebagai berikut :

- Dari target 55 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar terealisasi sebesar 47,99 persen atau sebesar 83,80 persen. Dimana dari 358 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 165 orang;
- Dari target 8.200 peluang kerja dan bisnis baru terealisasi sebesar 387 peluang kerja atau sebesar 4,72 persen.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 3.414.889.550,- (tiga milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.021.000,- (sembilan puluh satu juta dua puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 2,67 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan pelatihan masih menunggu pemenang tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pemenang tender pengadaan makan minum;
- Masih terbatasnya PNS pejabat fungsional pengantar kerja (1 orang pejabat fungsional);
- Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.

- d. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.

5. Program Hubungan Industrial

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi s/d tri. I	% Capaian
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	0,00%	29,84%	0,00%	0,00%
Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja (Pertahun)	3,87%	4,81%	0,00%	0,00%
Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	78,30%	69,00%	59,52%	66,88%

Dimana sampai dengan Triwulan I tahun 2022 target capaian kinerja program sebagai berikut:

- Dari target 29,84 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak belum ada realisasi karena perhitungan indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun;
- Dari target 4,81 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun belum ada realisasi karena perhitungan indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun
- Dari target 69 persen kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 59,52 persen atau sebesar 66,88 persen. Dimana dari 42 kasus hubungan industrial yang dilaporkan sebanyak 25 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.296.895.200,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.450.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 10,68 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan pelatihan masih menunggu pemenang tender pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pemenang tender pengadaan makan minum;
- b. Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator;

Untuk capaian Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 sampai dengan triwulan I Tahun 2022 (merupakan tahun pertama periode RENSTRA) 2 program dengan capaian kinerja di atas 20 persen dan 3 program masih nol hal ini disebabkan kegiatan yang menunjang indicator kinerja program secara langsung belum waktunya dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5 sesuai format Formulir Tabel T-C.29 di bawah ini:

TABEL 2.5 (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2022

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (treiulan I tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	2.07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 100.978.427.000																	
2	2.07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90 PERSEN	66.549.824.200		90	9.185.348.820	89	8.680.154.223		90	11.077.883.100	25	1.381.260.972	27,78%	2,08%		
				KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		100 PERSEN			100	100				100	25		25,00%					
				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS		90 PERSEN			90	90				90	25		27,78%					
2	2.07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	93 Dok	1.259.973.848		11	128.638.000	11	115.667.600		19	377.468.000	0	17.100.000	0,00%	1,36%		
2	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	10 Dok	521.249.980		2	69.599.000	2	60.888.200		2	234.957.000	0	17.100.000	0,00%	24,57%		
				Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah		2 Dok			1	1		0		0,00%								
2	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	49.643.596		1	11.034.000	1	10.967.800		1	9.577.000	0	0	0,00%	0,00%		
2	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	46.569.705		1	10.329.000	1	10.262.800		1	8.984.000	0	0	0,00%	0,00%		
2	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	46.440.114		1	8.717.000	1	8.298.700		1	8.959.000	0	0	0,00%	0,00%		
2	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	43.563.201		1	8.552.000	1	8.448.700		1	8.404.000	0	0	0,00%	0,00%		
2	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	5 Dok	510.276.242		1	11.384.000	1	8.059.200		1	98.440.000	0	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)		1 Keg.				4		0		0,00%								
				Jumlah Penyusunan Laporan Penilaian PMPRB		20 Tri.				1		0		0,00%								
				Jumlah Penyusunan Laporan Penilaian SAKIP		5 Keg.			1	1		0		0,00%								
2	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (RENJA)	5 Dok	42.231.009		1	9.023.000	1	8.742.200		1	8.147.000	0	0	0,00%	0,00%		
				Jumlah Dokumen LAKIP		5 Dok				4		0		0,00%								
				Jumlah Monitoring Evaluasi Rencana Kerja (RENJA)		20 Tri.			1	1		0		0,00%								
2	2.07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang	60 Bulan	50.955.298.867		12	7.650.632.949	12	7.385.768.206		12	7.177.774.840	3	1.142.354.798	5,00%	2,24%		
2	2.07	01	2.02	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan	60 Bulan	48.668.178.962		12	7.308.872.949	12	7.068.588.206		12	6.736.554.840	3	1.040.864.798	5,00%	2,14%		
2	2.07	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60 Bulan	1.337.997.801		12	245.760.000	12	221.180.000		12	258.120.000	3	56.490.000	5,00%	4,22%		
2	2.07	01	2.02	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60 Bulan	746.442.288		12	96.000.000	12	96.000.000		12	144.000.000	3	36.000.000	5,00%	4,82%		

2	2.07	01	2.02	07	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Bulan	202.679.816							12	39.100.000	3	9.000.000	5,00%	4,44%	
2	2.07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	60 Bulan	749.335.789			12	103.752.800	12	89.027.760		12	144.558.200	3	28.500.000	5,00%	3,80%
2	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Bulan	432.525.984			12	41.720.400	12	27.578.784		12	83.440.800	3	15.000.000	5,00%	3,47%
2	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	60 Bulan	316.809.805			12	62.032.400	12	61.448.976		12	61.117.400	3	13.500.000	5,00%	4,26%
2	2.07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Bulan	1.551.446.773			2	126.621.400	2	125.101.976		12	186.222.400	3	13.500.000	5,00%	0,87%
2	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	548 Pasang	340.919.382			108	64.800.000	108	63.986.000		108	64.800.000	108	0	19,71%	0,00%
2	2.07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Penyediaan Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Bulan	318.390.811			12	61.821.400	12	61.115.976		12	61.422.400	12	13.500.000	20,00%	4,24%
2	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	30 Orang	768.000.000			0	0	0	0		5	60.000.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	01	2.05	10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	124.136.580								0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	35 Jenis	4.239.420.059			8	318.509.382	8	267.036.426		7	798.091.868	5	68.561.561	14,29%	1,62%
2	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneragan Bangunan	40 Jenis	56.125.366			8	14.299.750	8	12.840.000		8	10.569.500	4	5.115.000	10,00%	9,11%
2	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	430.368.373			12	84.654.632	12	69.164.500		12	86.170.368	3	7.111.400	5,00%	1,65%
2	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bulan	244.625.725			4	17.190.000	4	16.450.000		4	54.326.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	20 Jenis	71.311.157			12	19.500.000	12	14.400.000		12	23.926.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	01	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	60 Bulan	103.547.438			12	72.865.000	12	57.465.026		12	19.500.000	3	4.000.000	5,00%	3,86%
2	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	60 Bulan	3.117.935.750			12	110.000.000	12	96.716.900		12	516.000.000	3	49.185.161	5,00%	1,58%
2	2.07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Bulan	215.506.250									87.600.000	3	3.150.000	5,00%	1,46%
2	2.07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	211 Unit	2.654.605.297			4	68.042.269	4	56.548.000		95	1.397.835.990	34	0	16,11%	0,00%
2	2.07	01	2.06	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Kursi Pejabat	4 Buah	675.000.000								1	290.200.000	0	0	0,00%	0,00%
					Jumlah Pengadaan Kursi Staf	40 Buah									20	0		0,00%			
					Jumlah Pengadaan Lemari Gantung	6 Set								3	0	0,00%					
					Jumlah Pengadaan Meja Arsip	8 Buah								3	0	0,00%					
					Jumlah Pengadaan Meja Kerja	4 Buah								1	0	0,00%					
					Jumlah Pengadaan Meja Partisi	36 Unit								12	0	0,00%					
					Jumlah Pengadaan Sofa	4 Set								2	0	0,00%					
					Jumlah Pengadaan AC	10 Unit			1		1				5	0		0,00%			
2	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Hardisk External	6 Unit		1	68.042.269	1	56.548.000			2	2	33,33%	0	52,50%	0,00%	
					Jumlah Pengadaan Laptop	12 Unit		1	1				8	7	58,33%						
					Jumlah Pengadaan Mic Wireless	1 Set		1	1				1	0	0,00%						
					Jumlah Pengadaan Personal Computer	40 Unit							21	21	0						
					Jumlah Pengadaan Pompa Air	1 Buah							1	0	0,00%						
					Jumlah Pengadaan Printer	23 Unit							5	2	8,70%						
					Jumlah Pengadaan Scanner	5 Unit							2	2	40,00%						
					Jumlah Pengadaan Tangga Lipat	1 Buah							1	0	0,00%						
					Jumlah Pengadaan Televisi	2 Unit							1	0	0,00%						

2	2.07	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	8 Unit	418.362.700						6	300.000.000	0	0	0,00%	0,00%	
2	2.07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	60 Bulan	2.214.879.842		3	486.462.220	3	379.276.839		12	447.190.600	3	88.811.663	5,00%	18,26%
2	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan	60 Bulan	835.286.545		12	147.740.600	12	146.093.744		12	181.046.200	3	40.500.000	5,00%	0,00%
2	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	1.232.513.065		12	263.544.020	12	158.651.095		12	237.770.400	3	41.561.663	5,00%	0,00%
2	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Kebersihan Kantor	60 Bulan	147.080.232		12	75.177.600	12	74.532.000		12	28.374.000	3	6.750.000	5,00%	4,59%
					Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	60 Bulan			12			12			3		5,00%			
2	2.07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	230 Unit	2.924.863.725		4	302.689.800	4	261.727.416		45	548.741.202	9	22.432.950	3,91%	7,41%
2	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan Secara Rutin/berkala	5 Unit	210.587.449		1	30.324.000	1	27.273.200		1	40.625.502	1	3.735.200	20,00%	1,77%
2	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Bus Pekerja Secara Rutin/Berkala	5 Unit	1.505.511.373		1	238.445.800	1	202.254.216		1	162.795.700	1	12.437.750	20,00%	0,83%
					Jumlah Pemeliharaan Mobil Operasional Secara Rutin/Berkala	35 Unit			6			6			6		2,86%			
					Jumlah Pemeliharaan Motor Operasional Secara Rutin/Berkala	35 Unit			7			7			7		0,00%			
2	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC Secara Rutin/Berkala	40 Unit	156.027.173		15	33.920.000	15	32.200.000		8	35.050.000	2	6.260.000	5,00%	4,01%
					Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop Secara Rutin/Berkala	75 Unit									15		3		4,00%	
					Jumlah Pemeliharaan Mesin Fotocopy	5 Unit			5			5			1		0		0,00%	
					Jumlah Pemeliharaan Printer Secara Rutin/Berkala	25 Unit			8			8			5		1		4,00%	
0	0	0	0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	5 Gedung	1.052.737.730						1	310.270.000	0	0	0,00%	0,00%	
2	2.07	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEBUTUHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DISUSUN	96,77 PERSEN	636.233.000		50%	46.860.000	50,00%	43.887.600		93,55	440.772.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	6 Dok.	636.233.000		1	46.860.000	1	43.887.600		2	440.772.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	2	0	12	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	1 Dok.	471.897.366						1	300.736.000	0	0	0,00%	0,00%	
2	2.07	2	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Penyusunan Draft Dokumen Rencana Kerja Makro	5 Dok.	164.335.634		50	46.860.000	50	43.887.600		1	140.036.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	1,20 PERSEN	20.134.599.650		90%	4.206.816.650	90,25%	3.772.050.104		0,58	3.773.340.150	0	31.500.000	0,00%	0,16%
					TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	23,00 PERSEN								21,00			0		0,00%	
					JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN	5.690 ORANG			80%		57,40%		1.060,00		0		0,00%			
2	2.07	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	4.560 Orang	11.068.673.234		620	3.433.153.050	620	3.060.215.840		800	2.178.607.050	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	3	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	2.800 Orang	10.123.339.130		620	3.178.930.050	620	2.813.233.040		620	1.999.973.050	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	3	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	1.760 Orang	945.334.104		240	254.223.000	240	246.982.800		180	178.634.000	0	0	0,00%	0,00%

2	2.07	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Mendapat Pembinaan	60 Kali	492.061.325		75	94.622.000	75	91.458.400		12	173.174.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	3	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	60 Kali	492.061.325		6	94.622.000	6	91.458.400		12	173.174.000	0	0	0,00%	0,00%
					Jumlah Peserta Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	350 Orang						100		0	0,00%					
					Jumlah Peserta Bimtek Bimtek Penyuluhan Standar Mutu Dan Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja	150 Orang	75		75	80		0		0,00%						
2	2.07	3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perizinan dan Pendaftaran	60 Kali	1.265.515.343		12	234.161.600	12	225.355.264		12	179.246.600	3	31.500.000	5,00%	2,49%
2	2.07	3	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja yang Disediakan	60 Kali	1.265.515.343		75	234.161.600	75	225.355.264		12	179.246.600	3	31.500.000	5,00%	2,49%
2	2.07	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Produktivitas	1.950 Orang	2.207.533.361		150	150.846.000	150	114.152.000		390	741.502.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	3	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi Achievement Motivation	250 Orang	2.207.533.361		150	150.846.000	150	114.152.000		50	741.502.000	0	0	0,00%	0,00%
					Jumlah Pelaksanaan Rekrutmen Pelatihan Berbasis Kompetensi	30 Keg.						6	0	0,00%						
					Jumlah Peserta Konsultasi K3	250 Orang						50	0	0,00%						
					Jumlah Peserta Konsultasi Penerapan SS di Perusahaan	250 Orang						50	0	0,00%						
					Jumlah Peserta Pelatihan Bahasa Asing	700 Orang						140	0	0,00%						
					Jumlah Peserta Pelatihan Gugus Kendali Mutu	250 Orang						50	0	0,00%						
					Jumlah Peserta Sosialisasi Pemagangan Dalam Negeri	250 Orang						50	0	0,00%						
					Jumlah Sosialisasi Pemagangan Luar Negeri	25 Kali						5	0	0,00%						
2	2.07	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Produktifitas Perusahaan	5 Kali	5.100.816.387		100	294.034.000	45	280.868.600		1	500.810.500	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	3	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pelaksanaan Seleksi Pemagangan Ke Luar Negeri	5 Keg.	5.100.816.387		25	294.034.000	25	280.868.600		1	500.810.500	0	0	0,00%	0,00%
					Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi	1.950 Orang			0	0		150		0	0,00%					
2	2.07	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR	75 PERSEN	9.042.923.149		50%	2.195.572.481	50,23%	964.127.023		55,00	3.414.889.550	46,09	91.021.000	61,45%	1,01%
					JUMLAH PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU	46.240 PELUANG KERJA							8.200,00	387,00	0,84%					
2	2.07	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Kota Makassar	60 Bulan	4.658.055.589		12	1.685.374.331	12	620.291.758		12	2.221.564.300	3	30.473.000	5,00%	0,65%
2	2.07	4	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Database Ketenagakerjaan	5 Dokumen	1.670.061.935		1	178.408.800	1	150.046.098		1	690.888.800	0	30.473.000	0,00%	1,82%
					Jumlah Pelayanan Antar Kerja	60 Bulan			12	12				3	5,00%					
0	0	0	0	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelayanan antar kerja	700 Orang	51.209.751							0	0	0	0	0,00%	0,00%
0	0	0	0	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	900 Orang	211.723.027							100	47.290.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	4	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Pendataan Penyandang Disabilitas Kota Makassar	5 Keg.	579.577.120		100	47.503.000	100	47.319.500		1	133.693.000	0	0	0,00%	0,00%
					Jumlah Penyediaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	5 ULD							100	0	0,00%					
2	2.07	4	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur	5 Lokasi	2.145.483.756		40	1.459.462.531	40	422.926.160		3	1.349.692.500	0	0	0,00%	0,00%
					Jumlah Peserta Pelatihan Padat Karya Produktif Teknologi Tepat Guna (TTG)	250 Orang								50	0		0,00%			
					Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	250 Orang			4	1		100		0	0,00%					

2	2.07	4	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan rekomendasi Penerbitan Izin LPTKS	60 Bulan	310.550.466			12	72.905.400	12	72.185.676		12	58.727.600	12	9.000.000	20,00%	2,90%
2	2.07	4	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi yang disediakan	60 Bulan	227.504.964			12	61.041.400	12	60.598.176		12	43.085.600	3	9.000.000	5,00%	3,96%
2	2.07	4	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	20 Triwulan	83.045.502			4	11.864.000	4	11.587.500		4	15.642.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	60 Bulan	3.031.203.308			12.000	373.368.500	9.627	232.009.589		12	965.439.400	3	51.548.000	5,00%	1,70%
2	2.07	4	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60 Bulan	316.496.699			12	23.232.000	12	7.438.089		12	59.613.600	3	11.048.000	5,00%	3,49%
2	2.07	4	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	60 Bulan	1.000.699.896			12	225.794.500	12	224.571.500		12	249.826.800	3	40.500.000	5,00%	4,05%
2	2.07	4	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja	5 Kali	1.714.006.714			1	124.342.000	0	0		2	655.999.000	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI Purna Penempatan yang Diberi pembekalan pelatihan	1.000 Orang	1.043.113.786			20	63.924.250	0	39.640.000		140	169.158.250	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	4	2.03	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pembinaan Pekerja Migran Indonesia (calon)	800 Orang	559.970.481								100	41.589.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
2	2.07	4	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (calon/purna yang diberikan pembinaan)	200 Orang	483.143.304			20	63.924.250	20	39.640.000		40	127.569.250	0	0	0,00%	0,00%
2	2.07	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	51,00 PERSEN	4.614.847.000			2,50%	635.291.200	3,87%	604.263.778		29,84	1.296.895.200	0	138.450.000	0,08%	3,00%
					ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN	2,50 PERSEN								4,81	0	1,55%					
					PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	89,00 PERSEN				70,00%		78,30%		69,00	59,52	66,88%					
2	2.07	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengesahan PP dan pelayanan Pendaftaran PKB	60 Bulan	1.332.331.879			12	253.240.000	12	233.382.350		12	606.266.000	3	73.350.000	5,00%	5,51%
2	2.07	5	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Bimbingan Teknis Penyusunan PP/PKB sesuai PERMEN No. 28 Tahun 2014	300 Orang	283.221.159			60	48.739.000	60	44.443.750		50	55.220.000	0	0	0,00%	0,00%
					Jumlah Pemantauan Pelaksanaan PP/PKB di Perusahaan	20 Triwulan				50	50				4	0		0,00%			
2	2.07	5	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan PKWT bagi Perusahaan	10 Kali	133.896.405			2	26.759.000	2	25.912.900		2	53.346.000	0	0	0,00%	0,00%
					Jumlah Pembinaan Alih Daya Perusahaan Sesuai PP No. 35 Tahun 2021	100 Orang							60	0	0,00%						
					Jumlah Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan	200 Orang							60	0	0,00%						
2	2.07	5	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Pemantauan KHL untuk Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) di Perusahaan	60 Kegiatan	915.214.315			4	177.742.000	4	163.025.700		12	497.700.000	4	73.350.000	6,67%	8,01%
					Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pemberian THR di Perusahaan	10 Kegiatan				4	4				2	4		40,00%			
					Jumlah Peserta Pembinaan Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) di Perusahaan	250 Orang				1	1				50	1		0,40%			
2	2.07	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	60 Bulan	3.282.515.121			12	382.051.200	12	370.881.428		12	690.629.200	3	65.100.000	5,00%	1,98%

2	2.07	5	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Dialog Ketenagakerjaan	5 Kegiatan	622.236.026			2	2	24.082.000	2	22.500.000			1	196.801.000	0	0	0,00%	0,00%
					Jumlah Pelaksanaan Kampanye Hari Buruh Sedunia	5 Kegiatan								1		0	0,00%						
					Jumlah Pembinaan Dan Pemantauan PHK Di Kota Makassar Sesuai Dengan Pp No. 35 Tahun 2021	250 Orang			2	2		50		0		0,00%							
2	2.07	5	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	60 Bulan	1.087.010.870			12	12	187.383.200	12	184.809.528		12	194.381.200	3	31.500.000	5,00%	16,81%	
2	2.07	5	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan	10 Kali	166.410.909			1	1	11.018.000	1	10.900.000		2	28.610.000	0	0	0,00%	0,00%	
2	2.07	5	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Operasional LKS Tripartit	60 Kali	1.071.824.265			12	12	159.568.000	12	152.671.900		12	204.283.000	3	33.600.000	5,00%	21,06%	
2	2.07	5	2.02	05	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan	20 Kali	335.033.052			12	12	159.568.000	12	152.671.900		4	66.554.000	0	0	0,00%	0,00%	
					Jumlah Peserta Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	750 Orang								150	0	0,00%							

Catatan : Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tahun awal dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Makassar, April 2022

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH, M. AP.
Nip. 19651210 199112 2 001

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 terdiri dari 5 indikator sebagai berikut :

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja;
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi;
3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan);
5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota.

Untuk bidang urusan tenaga kerja termasuk urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sampai dengan Triwulan I Pada Tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada tabel 2.6 sesuai format formular table T-C.30 di bawah ini :

Tabel 2.6 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK Tahun 2026	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-		-	-	93,55	93,55	-	67,35	93,55	93,55	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	1,20	-	-	0,58	0,70	-	0,40	0,58	0,70	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	23,00	-	-	21,00	21,50			21,00	21,50	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-	51,01	-	-	29,84	33,69	-	26,95	29,84	33,69	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	-	75,00	-	-	55,00	60,00		50,23	55,00	60,00	

Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dengan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota.

Pencapaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 67,35 persen dimana dari 33 jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD sebanyak 49 jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota berdasarkan RTKD.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan.

Pencapaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 0,40 persen dimana sebanyak 1.594 jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dari 39.6951 jumlah tenaga kerja keseluruhan.

3. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja adalah perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (harga konstan) (Miliar Rupiah) terhadap jumlah penduduk yang bekerja.

Pencapaian kinerja Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja pada tahun 2021 sebesar 20,05 persen, dimana dari 126.312,83 milyar Produk Domestik Regional Bruto (harga konstan) dihasilkan oleh 629.933 tenaga kerja.

4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) merupakan perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) terhadap jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar.

Pencapaian kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 26,95 persen dimana sebanyak 1.401 jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak dari 5.195 jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar.

5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang ditempatkan terhadap jumlah mencari kerja melalui mekanisme layanan antar kerja.

Pencapaian kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 50,23 persen dimana dari 2.570 orang pencari kerja melalui mekanisme layanan antar kerja yang ditempatkan sebanyak 1.291 orang.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN

Isu - isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan sektor ketenagakerjaan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dalam menentukan isu-isu strategis ini dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunites and Threats) dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan melihat lingkungan bisnis secara internal dan eksternal pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Berikut hasil dari analisis :

Tabel 2.7
Analisa SWOT dalam Penentuan Isu-Isu Strategis
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

<p>KEKUATAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang mendukung; • Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan 10.000 skill training gratis dan kemudahan akses 100.000 peluang kerja/bisnis baru selama 5 (lima) tahun; • Tersedia sistem Informasi Pasar Kerja; • Terbentuknya Forum HRD, Bursa Kerja Khusus (BKK), UP3, Dewan Tripartit, Dewan Pengupahan, LPK Binaan. 	<p>KELEMAHAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Pejabat Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dibandingkan dengan layanan yang diberikan (jumlah perusahaan di Kota Makassar, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk angkatan kerja); • Belum tersedianya database Ketenagakerjaan yang realtime; • Keterbatasan anggaran; • Masih kurangnya sinkronisasi antar OPD dalam melaksanakan kegiatan lintas sectoral.
<p>PELUANG :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar yang tinggi; 	<p>ANCAMAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonus demografi apabila tidak dapat dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja atau tidak dapat

<ul style="list-style-type: none"> • Kota Makassar sebagai Kota Pendidikan dan Kota Jasa; • Jumlah Angkatan Kerja usia Produktif yang tinggi; • Kerjasama sama dengan ADB dalam Program Jobstrat, BLKI Kementerian Ketenagakerjaan RI, dengan asosiasi pengusaha dalam pemagangan, Kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam Pemagangan Luar Negeri (Jepang). 	<p>diserap oleh lapangan kerja akibat kurangnya SDM Tenaga Kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar tidak diiringi oleh elastisitas penyerapan kesempatan kerja; • Masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk wajib lapor Ketenagakerjaan; • Investasi di Kota Makassar masih merupakan padat modal bukan padat karya; • Urbanisasi yang tidak diikuti oleh SDM yang siap bersaing;Ma • Masih tingginya Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja.
---	---

Berdasarkan analisa di atas, berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2021-2026, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan :

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan
3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial

Dari hasil analisis SWOT tersebut juga kemudian dirumuskan untuk dapat digunakan sebagai strategi perencanaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, sebagai berikut.

1. Strength and Opportunities (SO)

Memanfaatkan Informasi lowongan kerja secara akurat dan terpercaya, sehingga dapat memberikan daya tarik para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan

komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan 10.000 skill training gratis dan kemudahan akses 100.000 peluang kerja/bisnis baru selama 5 (lima) tahun, kerjasama sama dengan stakeholder dan keterlibatan dunia pendidikan serta dunia usaha dalam menciptakan tenaga kerja trampil yang dapat berdaya saing dalam penyerapan kesempatan kerja di Kota Makassar.

2. Strength and Threats (ST)

Memberikan pemahaman dan meningkatkan pemantauan pada perusahaan yang ada di Kota Makassar dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang terampil untuk dapat memberikan kesadaran wajib lapor. Meningkatkan informasi lowongan kerja yang akan memberikan minat atau kepercayaan kepada pencari kerja. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat terserap dalam lapangan kerja yang tersedia.

3. Weaknesses and Opportunities (WO)

Menambah jumlah Sumber Daya Manusia yang terampil pada setiap bidang dan membuat aplikasi database Ketenagakerjaan yang realtime (SARRING) untuk memperlancar proses bisnis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan memudahkan pencari kerja dan penyedia kerja dapat berinteraksi secara langsung secara online.

4. Weaknesses and Threats (WT)

Menambah jumlah pejabat fungsional Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan Ketenagakerjaan. Menyusun regulasi untuk lebih memperketat dalam pengawasan wajib lapor Ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja lokal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan

maju. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Adapun rancangan awal usulan RKPD tahun 2023 sebesar Rp. 18.730.243.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dimana antara rumusan kegiatan dalam rancangan awal RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan RENJA SKPD. Pada rancangan akhir usulan RKPD tahun 2023 sebesar Rp 16,399,301,944,- (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel 2.8 dengan format formulir T-C.31 di bawah ini :

TABEL 2.8 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA MAKASSAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

Lembar.....dari.....

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
									(Rp)					(Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
02	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
02	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90 Persen	10.333.799.664	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90 Persen	10.333.799.664	
				PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH			100 Persen	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH				100 Persen			
				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS			90 Persen	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS				90 Persen			
02	07	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	272.589.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	272.589.000	
02	07	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	130.295.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	2 Dokumen	130.295.000	
02	07	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.651.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.651.000	
02	07	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.984.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.984.000	
02	07	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.764.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.764.000	
02	07	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.788.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.788.000	
02	07	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	97.785.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	5 Dokumen	97.785.000	
02	07	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.322.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP	2 Dokumen	7.322.000	
02	07	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	7.275.827.940	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	7.275.827.940	
02	07	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/Bulan	6.891.107.940	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/Bulan	6.891.107.940	
02	07	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	240.720.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	240.720.000	
02	07	01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.000.000	
02	07	01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	0	
02	07	01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	12 Bulan	143.673.200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	12 Bulan	143.673.200	
02	07	01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	83.440.800	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	83.440.800	
02	07	01	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	60.232.400	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	60.232.400	
02	07	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kewargaiaan	12 Bulan	204.488.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kewargaiaan	12 Bulan	204.488.400	

02	07	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	75.000.000	
02	07	01	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	60.488.400	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	60.488.400	
02	07	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	69.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	69.000.000	
02	07	01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	
02	07	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	998.941.840	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	998.941.840	
02	07	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.560.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.560.100	
02	07	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	68.812.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	68.812.200	
02	07	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	56.204.540	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	56.204.540	
02	07	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.465.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.465.000	
02	07	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	12 Dokumen	19.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	12 Dokumen	19.500.000	
02	07	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	420.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	420.000.000	
02	07	01	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	404.400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	404.400.000	
02	07	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Unit	216.466.750	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Unit	216.466.750	
02	07	01	07	05	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	30.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Lemari Gantung	3 Unit	30.000.000	
02	07	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	186.466.750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	186.466.750	
02	07	01	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	
02	07	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	648.055.784	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	648.055.784	
02	07	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	180.357.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	180.357.200	
02	07	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	328.443.084	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	328.443.084	
02	07	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	139.255.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	139.255.500	
02	07	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	63 Unit	573.756.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	63 Unit	573.756.750	
02	07	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.759.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.759.200	
02	07	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	306.757.550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	306.757.550	
02	07	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	36.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	36.050.000	
02	07	01	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	
02	07	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	190.190.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	190.190.000	
02	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	93,55 Persen	231.508.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	93,55 Persen	231.508.000	
02	07	02	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2 Dokumen	231.508.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2 Dokumen	231.508.000	
02	07	02	01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	156.666.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	156.666.000	
02	07	02	01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	150 Perusahaan	74.842.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	74.842.000	
02	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	0,70 Persen	3.508.303.100	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	0,70 Persen	3.508.303.100	

						TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	21,50 Persen			TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	21,50 Persen			
						JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN	1.000 Orang			JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN	1.000 Orang			
02	07	03	01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	560 Orang	2.336.805.500	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan	676 Orang	2.336.805.500
02	07	03	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	560 Orang	2.300.590.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	676 Orang	2.300.590.000
02	07	03	01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	60 Lembaga	36.215.500	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	50 Lembaga	36.215.500
02	07	03	02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	150 Lembaga	151.996.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	151.996.000
02	07	03	02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	150 Lembaga	151.996.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	151.996.000
02	07	03	03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20 Perizinan	183.000.400	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20 Perizinan	183.000.400
02	07	03	03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	20 Perizinan	183.000.400	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	24 Perizinan	183.000.400
02	07	03	04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	300 Perusahaan	609.156.000	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	200 Perusahaan	609.156.000
02	07	03	04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan	300 Perusahaan	609.156.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan	200 Perusahaan	609.156.000
02	07	03	05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	4 Dokumen	227.345.200	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	4 Dokumen	227.345.200
02	07	03	05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga	4 Dokumen	227.345.200	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga	4 Dokumen	227.345.200
02	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR	60,00 %	1.257.346.780	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR	60,00 %	1.257.346.780
							JUMLAH PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU	8.640 Peluang Kerja				JUMLAH PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU	8.640 Peluang Kerja	
02	07	04	01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Pelayanan Antarkerja	12 Bulan	621.125.080	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Pelayanan Antarkerja	12 Bulan	621.125.080
02	07	04	01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui	33 Orang	47.127.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui	33 Orang	47.127.000
02	07	04	01	02	Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1.500 Orang	82.877.500	Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1.500 Orang	82.877.500
02	07	04	01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	25.269.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	25.269.000
02	07	04	01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	100 Orang	69.828.200	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50 Orang	69.828.200
02	07	04	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	258 Orang	396.023.380	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	180 Orang	396.023.380
02	07	04	02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	6 Lembaga	84.638.600	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	6 Lembaga	84.638.600
02	07	04	02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	42.453.600	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	42.453.600
02	07	04	02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	42.185.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	42.185.000
02	07	04	03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	453.906.200	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	453.906.200
02	07	04	03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	42.767.600	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	42.767.600
02	07	04	03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4.500 Orang	46.109.600	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3.000 Orang	46.109.600

02	07	04	03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	500 Orang	365.029.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	500 Orang	365.029.000	
02	07	04	04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan	140 Orang	97.676.900	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan	140 Orang	97.676.900	
02	07	04	04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	25.310.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	25.310.000	
02	07	04	04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 Orang	72.366.900	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	72.366.900	
02	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	33,69 Persen	1.068.344.400	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Kota Makassar	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	33,69 Persen	1.068.344.400	
							ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHAUN	4,14 Persen				ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHAUN	4,14 Persen		
							PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	74,00 Persen				PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	74,00 Persen		
02	07	05	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	150 Perusahaan	43.695.700	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	35 Perusahaan	43.695.700	
02	07	05	01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	1.708.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	1.708.000	
02	07	05	01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan	1.280.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 Perusahaan	1.280.000	
02	07	05	01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	40.707.700	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	40.707.700	
02	07	05	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	270 Perkara	1.024.648.700	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	270 Perkara	1.024.648.700	
02	07	05	02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	70 Perkara	127.582.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	70 Perkara	127.582.000	
02	07	05	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasaikan	200 Perkara	174.318.400	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasaikan	200 Perkara	174.318.400	
02	07	05	02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Makassar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan 2 Serikat Pekerja	21.966.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Makassar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan 2 Serikat Pekerja	21.966.000	
02	07	05	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	336.630.800	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	336.630.800	
02	07	05	02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	364.151.500	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	364.151.500	
TOTAL PAGU INDIKATIF									16.399.301.944	16.399.301.944					

2.5. PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2022, terdapat 27 (dua puluh tujuh) usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yaitu dari 9 (Sembilan) Kecamatan. Penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) usulan kegiatan yang masuk yang tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan;
2. Dari 33 (tiga puluh tiga) usulan kegiatan yang terakomodir pada Forum SKPD Kota Makassar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) usulan kegiatan atau sebesar 100 persen;
3. Dari 33 (tiga puluh tiga) usulan kegiatan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) usulan merupakan hasil Musrenbang dan 6 (enam) usulan merupakan dari Pokok Pikiran DPRD;
3. Usulan Kegiatan yang masuk didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja;

Adapun usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2022 yang terakomodir di desk Forum SKPD Kota Makassar sebagaimana disajikan pada tabel 2.9 dengan format formulir T-C.32 di bawah ini :

TABEL 2.9 (FORMAT T-C.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KOTA MAKASSAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jalan Kijang No. 9c Makassar, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Perbengkelan	10 Orang	Terakomodir
2	Perluasan Kesempatan Kerja	Jalan Landak I No.21 Kantor Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang, Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan	49 Orang	Terakomodir
3	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	JL.VETERAN SELATAN KANTOR LURAH MARICAYA SELATAN NO 152, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga	20 Orang	Terakomodir
4	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl. Biring Romang Dalam RW 08 & Jl. Baiturrahman RW 01, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan	15 Orang	Terakomodir
5	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	KELURAHAN TAMANGAPA, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Sablon Baju	50 Orang	Terakomodir
6	Perluasan Kesempatan Kerja	Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan	50 Orang	Terakomodir
7	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Sablon Baju	50 Orang	Terakomodir
8	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	kel.bontorannu kec. mariso kota makassar, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Kecantikan/Tatarias/Pangkas Rambut/Make Up Artist	50 Orang	Terakomodir
9	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Cendrawasih Lr. 31 No. 24 RW. 01,02,03 dan 04, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Perbengkelan	60 Orang	Terakomodir
10	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kantor Lurah Kalukuang Jl. Petta Punggawa No. 95, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Mengendarai Kendaraan	100 Orang	Terakomodir
11	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kantor Lurah Kalukuang Jl. Petta Punggawa No. 95, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Komputer dan Aplikasi	100 Orang	Terakomodir

12	Perluasan Kesempatan Kerja	wilayah kelurahan ujung pandang baru, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan	50 Orang	Terakomodir
13	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jalan Tugu RT.02 RW.03, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar	50 Orang	Terakomodir
14	Perluasan Kesempatan Kerja	Jalan Dg. Regge Lr. 3, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan	50 Orang	Terakomodir
15	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Bira, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Perbengkelan	30 Orang	Terakomodir
16	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Permandian Alam Barombang RW 002/RT 002, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Komputer dan Aplikasi	30 Orang	Terakomodir
17	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Warga Kelurahan Gusung, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Komputer dan Aplikasi	50 Orang	Terakomodir
18	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Warga Kelurahan Gusung, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Service Handphone	50 Orang	Terakomodir
19	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Satando No. 55, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Sablon Baju	50 Orang	Terakomodir
20	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Satando No. 55, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Service Handphone	50 Orang	Terakomodir
21	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl Serda Usman Ali No 12 Kantor Kelurahan Totaka, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Kecantikan/Tatarias/Pangkas Rambut/Make Up Artist	50 Orang	Terakomodir
22	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Serda Usman Ali No. 12, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Service Handphone	50 Orang	Terakomodir
23	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl. Serda Usman Ali No. 12, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan	50 Orang	Terakomodir
24	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	KELURAHAN MALIMONGAN, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Service Handphone	100 Orang	Terakomodir
25	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	kelurahan malimongan, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Sablon Baju	100 Orang	Terakomodir

26	Perluasan Kesempatan Kerja	RW. 001, RW. 002, RW. 004 , RW. 005, dan RW. 006 Jl. Salemo No.60, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga/Masakan/Pengolahan Makanan/Kuliner	15 Orang	Terakomodir
27	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	RW. 001, RW. 002, RW. 004, RW. 005, dan RW. 006 Jl. Salemo No. 60, Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Komputer dan Aplikasi bagi Masyarakat	25 Orang	Terakomodir
28	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl. Tamangaparaya III (H. A. NURHALDIN NH/WAKIL KETUA DPRD)	Masyarakat menginginkan agar di sediakannya lapangan kerja		Terakomodir dengan memberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat dapat menjadi tenaga kerja mandiri
29	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl. Bau Mangga 2 Kel. Masale, Kec. Panakkukang (H. A. NURHALDIN NH/WAKIL KETUA DPRD)	Masyarakat menginginkan agar di sediakannya lapangan kerja		Terakomodir dengan memberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat dapat menjadi tenaga kerja mandiri
30	Perluasan Kesempatan Kerja	jl. Suka Mulya Kel. Tamamaung, Kec Panakkukang (H. A. NURHALDIN NH/WAKIL KETUA DPRD)	Masyarakat menginginkan agar di sediakannya lapangan kerja		Terakomodir dengan memberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat dapat menjadi tenaga kerja mandiri
31	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Warga Pattunuang (SUPRATMAN/FRAKSI PARTAI NASDEM)	Kursus menjahit & modal Usaha		Terakomodir dengan memberikan pelatihan menjahit
32	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kompleks Kodam Katangka Blok E No. 19 Kel. Minasa Upa Kec. Rappocini (H. IRWAN DJAFAR, SE/FRAKSI PARTAI NASDEM)	Pelatihan kerja untuk pemuda dan ibu rumah tangga serta lansia		Terakomodir

33	Perluasan Kesempatan Kerja	<p>1.Jl. Biring Romang Lorong 5 tembus Perumahan Gading 3 (samping kampus UKIP) Kel. Kapasa, Kec. Biringkanaya ± 300m</p> <p>2.Jl. Radio 2 dan Jl. Radio 3 RW 01 RT 01 Kel. Berua Kec. Biringkanaya ± 200m 1</p> <p>3. blok Lorong lakipadada RT 004 RW 005 Kel Katimbang Kec. Biringkanaya ± 100m . (MARIO DAVID Pn., S.Sos., MM/FRAKSI PARTAI NASDEM)</p>	Perbaiki jalan aspal/paving blok		Terakomodir
----	----------------------------	--	----------------------------------	--	-------------

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi/Lembaga terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini di maksudkan agar program penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak mengenal batas wilayah.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sector penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan menciptakan dan

menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi, yang berorientasi pada peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi penduduk.

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas permasalahan tenaga kerja akan berkaitan dengan pasar kerja dalam arti luas yang meliputi masalah kebutuhan dan penawaran tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, upah tenaga kerja, serta segala dinamika lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Sebagai subjek pembangunan dimana tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya penduduk usia kerja merupakan modal utama pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang harus dijamin haknya diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral yang mempunyai keterkaitan dengan sector lain, keterkaitan itu tidak hanya kepentingan tenaga kerja tetapi juga dengan kepentingan masyarakat, mencakup pula pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial.

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tengah menyusun rencana strategis (renstra) ketenagakerjaan tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut menyebut 8 (delapan) arah kebijakan resntra Kemnaker pada 2020-2024. Rinciannya adalah sebagai berikut ini.

1. Mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills;
3. Pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah;
4. Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi “demand” tenaga kerja;
5. Memperkuat relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI);
6. Meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik;
8. Meningkatkan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

Strategi pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan, TA 2018 – 2023 bidang tenaga kerja ditetapkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Tenaga Kerja.

Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, aspek perencanaan dan informasi sangat penting artinya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta menyediakan informasi ketenagakerjaan secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.

2. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja.

Sistem informasi tenaga kerja berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, evaluasi dan menopang tenaga kerja, khususnya perencanaan tenaga kerja. Langkah – langkah yang direkomendasikan dalam upaya memperkuat institusi pasar kerja meliputi :

- a. Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi lebih efektif antara dinas terkait maupun antara unit dalam dinas.
 - b. Memperkokoh proses kelemahan desentralisasi, untuk menyempurnakan kebijakan yang ada pada tingkat regional dan lokal.
 - c. Mengembangkan SDM pada tingkat regional.
 - d. Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang ada, termasuk upaya peningkatan kapasitas teknik sistem tersebut, serta melengkapi dengan fasilitas agar secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap kualitas tenaga kerja yang ada.
 - e. Memperkokoh dialog sosial antar kerja tripartit.
3. Perluasan kesempatan kerja dan padat karya.
- Tugas penting yang harus dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Propinsi saat ini adalah menciptakan kesempatan kerja. Strategi yang dilaksanakan adalah :
- a. Perluasan kesempatan kerja di sektor – sektor pertanian.
 - b. Perluasan kesempatan kerja di sektor industri / usaha kecil dan menengah dan sektor Jasa.
4. Pemberdayaan dan Optimalisasi Sumber Daya Pelatihan Nasional.
- Strategi yang dilaksanakan adalah :
- a. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
 - b. Peningkatan relevansi, kualitas dan efesiensi pelatihan kerja, melalui pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan

tenaga ahli pelatihan, sistem dan metode pendekatan, kelembagaan dan akreditasi.

c. Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar sektor.

5. Pengembangan Bursa Tenaga Kerja Terpadu :

Untuk memperbaiki layanan ketenagakerjaan dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam pemberdayaan bursa tenaga kerja, direncanakan beberapa program sebagai berikut :

a. Dikembangkan suatu program yang mampu memberikan bantuan dan tanggapan yang cepat terhadap tenaga kerja yang terkena PHK, juga perusahaan, Serikat Pekerja dan masyarakat yang menderita akibat lesunya ekonomi, penutupan pabrik/ perusahaan atau pemutusan hubungan kerja masal.

b. Perlunya suatu jaringan komunikasi yang on line dengan seluruh Dinas Tenaga Kerja agar informasi dan data bursa tenaga kerja dapat dihasilkan dan dikirim tepat waktu.

c. Perubahan status bursa tenaga kerja mutlak dilakukan agar reformasi bursa tenaga kerja dapat berhasil, karena hal ini akan menarik para profesional dan mereka yang memiliki keahlian teknis untuk bekerja di kantor bursa tenaga kerja.

6. Penempatan Tenaga Kerja Ke luar Negeri.

Dalam upaya memperoleh dan memperluas kesempatan kerja di luar negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia, sekaligus untuk memperbesar prolehan devisa melalui remittansi, maka program export jasa tenaga kerja ke luar negeri akan terus ditingkatkan.

7. Implementasi Hubungan Industrial dalam Iklim Keterbukaan

Beberapa upaya strategis yang diperlukan adalah :

a. Reformasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

b. Pendidikan Perburuhan.

c. Pemasyarakatan keadaan baru dibidang hubungan industrial dalam era keterbukaan.

8. Perlindungan dan Peningkatan Kehidupan Serta Kesejahteraan Pekerja.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup pekerja, agar dapat hidup lebih layak perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Strategi yang akan dilaksanakan :

- a. Perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan perempuan;
- b. Jaminan sosial syarat kerja;
- c. Perlindungan pengupahan;
- d. Perlindungan tenaga kerja keluar negeri;
- e. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- f. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- g. Penegakan hukum dan pengawasan norma ketenagakerjaan.

3.1.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun yang menjadi target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel.3.1
Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TARGET		INDIKATOR
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua.		
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.		
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara		
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	10.4.1. (a)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan dimana untuk non urusan sesuai dengan misi pertama (1) “Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi”, pada tujuan 1.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif pada sasaran 1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah. Sedangkan untuk urusan tenaga kerja sesuai dengan misi kedua (2) Kota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan Kota yang Kuat Untuk Semua”, pada tujuan 2..2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru serta pada sasaran 2.2.2. Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi. Adapun rumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Tahun 2023

Tujuan 1 : Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru		
Indikator Tujuan : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		60,28%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1.1. Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	1.1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	52,00%
	1.1.2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,50%
Tujuan 2 : Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif		
Indikator Tujuan : Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun		4,14%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja

2.1. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	2.1.1. Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,14%
Tujuan 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan		
Indikator Tujuan : Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		47,00%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
3.1 Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	1.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00 %
	1.1.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	80,00 %

Adapun sinkronisasi arah kebijakan dengan pusat dan provinsi dapat dilihat pada tabel 3.3 dan konsistensi dengan dokumen Perencanaan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

TABEL 3.3
TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN PUSAT DAN PROVINSI

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
1. Mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi	1. Meningkatkan informasi tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, nasional dan pasar kerja internasional serta memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua.	1. Meningkatnya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi demand tenaga kerja			
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills			
4. Pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah			
5. Memperkuat relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI)			
6. Meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru pekerja migran Indonesia di luar negeri			
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.	3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	2. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	2. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mengimplementasikan seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Makassar, sehingga RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan stakeholder

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kota Makassar, arah kebijakan dan strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2023 disusun untuk mendukung pencapaian pada sasaran pembangunan sebagai berikut: Sasaran 2.2.1 : “Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru”, melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diimplementasikan pada Program Penempatan Tenaga Kerja.

Mengingat dampak pandemi Covid 19 terhadap ketenagakerjaan tidak dapat dihindari, maka dilakukan berbagai cara guna meminimalkan dampak negatif tersebut. Tantangan persaingan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan semakin ketat. Untuk itu diperlukan kesadaran, kepedulian dan kebersamaan semua pihak untuk mengatasi serta melakukan langkah-langkah strategis ke depan.

Guna mengantisipasi dampak negatif tersebut, pemerintah telah menetapkan enam kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Pertama, paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK;
2. Insentif pajak penghasilan bagi para pekerja,

3. Jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal;
4. Pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK;
5. Perluasan program industri padat karya;
6. Memberikan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke tanah air.

Sehubungan dengan hal itu, maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menganggap perlu mengombinasikan jaminan sosial dengan investasi pada layanan ketenagakerjaan (public employment services); mengombinasikan pelayanan digital dengan konseling personal dan jasa penempatan; serta meningkatkan informasi tentang pasar tenaga kerja.

Adapun keterkaitan antara RKPD Kota Makassar Tahun 2023 dengan Program Prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.5 (T-B.52)
RUMUSAN PROGRAM PRIORITAS

- **Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya Kompetensi angkatan kerja dan pemuda**
Indikator : - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

No.	Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rendahnya mutu dan kompetensi sumber daya tenaga kerja	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja yang berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,70%
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,50%
				Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	55,00%
				Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.000 Orang
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingginya angka pengangguran	Penyediaan peluang kerja dan bisnis baru	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60,00%
				Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	8.640 Peluang Kerja

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) urusan wajib yang dirumuskan berdasarkan:

1. Usulan Masyarakat melalui proses musrenbang dan forum SKPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar;
2. Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian SDGs dalam pembangunan berkelanjutan
2. Pengentasan pengangguran;
3. Pencapaian target Sasaran pada RPJMD Tahun 2022-2026 Kota Makassar;
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Perumusan program dan kegiatan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Tahapan ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk

perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan bidang ketenagakerjaan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Pandemi Covid-19 turut berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran yang meningkat pada tahun 2020. Dinas Ketenagakerjaan melakukan 3 langkah strategis guna menekan angka pengangguran di masa pandemi Covid-19.

Langkah strategis itu mulai dari melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya berasal dari pencari kerja baru akan tetapi juga berasal dari tenaga kerja yang terkena PHK akibat Covid-19. Selain itu dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mendapatkan pemagangan dan sertifikasi profesi/kompetensi.

Langkah strategis ke 2 (dua) melalui Program Penempatan Tenaga Kerja melalui pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja/buruh terdampak Covid-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Dimana dampak negatif Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, tidak hanya dirasakan oleh perusahaan dan pekerjanya di sektor formal. Namun juga dirasakan oleh pekerja di sektor informal seperti buruh bebas maupun pekerja mandiri.

Langkah strategis ketiga, Dinas Ketenagakerjaan melalui Program Hubungan Industrial telah melakukan pendataan terutama perusahaan yang terdampak serta jumlah pekerja yang dirumahkan dan atau di PHK; pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja sehingga di perlakukan secara adil oleh pemberi kerja melalui pelatihan kerja dan memperoleh pelatihan-pelatihan, membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK akibat Covid-19 dan

meningkatkan layanan mediasi bila terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

Penyusunan program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program perangkat daerah sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini :

TABEL 3.6 (T-B.52)
KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja
1. Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,28%	1.1. Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	52,00%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	0,00%	93,55%
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	50,33%	60,00%
							Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	-	8.640 Peluang Kerja
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,50%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,40%	0,70%
							Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20,66%	21,50%
							Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	650 Orang	1.000 Orang
2. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahunan	4,14%	2.1. Meningkatnya Hubungan Industrial	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahunan	4,14%	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak		33,69%

			yang Harmonis				Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahun		4,14%
							Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)		74,00%
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	47,00%	3.1. Tersedianya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00%	90,00%
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	80,00%		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%
							Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00%	90,00%

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Direncanakan dengan 5 (lima program), 20 (dua puluh) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan;
2. Tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Makassar;
3. Kebutuhan dana sebesar Rp. 16,399,301,944,- (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagaimana tertuang pada tabel 3.7 dengan format formulir T-C.33 berikut:

TABEL 3.3 (FORMAT T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA MAKASSAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
02	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
02	07				16.399.301.944								
02	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	KOTA MAKASSAR	90 PERSEN	10.333.799.664	APBD		90 PERSEN	11.142.262.640
					PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100 PERSEN		100 PERSEN					
					PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90 PERSEN		90 PERSEN					
02	07	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	13 Dokumen	272.589.000	APBD		13 Dokumen	291.670.230
02	07	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	2 Dokumen	130.295.000	APBD		2 Dokumen	139.415.650
02	07	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	9.651.000	APBD		1 Dokumen	10.326.570
02	07	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	8.984.000	APBD		1 Dokumen	9.612.880
02	07	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	9.764.000	APBD		1 Dokumen	10.447.480
02	07	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	8.788.000	APBD		1 Dokumen	9.403.160
02	07	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	5 Dokumen	97.785.000	APBD		5 Dokumen	104.629.950
02	07	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	2 Dokumen	7.322.000	APBD		2 Dokumen	7.834.540
02	07	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kota Makassar	12 Bulan	7.275.827.940	APBD		12 Bulan	7.821.135.896
02	07	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	61 Orang/Bulan	6.891.107.940	APBD		61 Orang/Bulan	7.373.485.496

02	07	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	12 Dokumen	240.720.000	APBD		12 Dokumen	257.570.400
02	07	01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	12 Dokumen	144.000.000	APBD		12 Dokumen	154.080.000
02	07	01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	0 Laporan	0	APBD		0 Laporan	36.000.000
02	07	01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	12 Bulan	143.673.200	APBD		12 Bulan	153.730.324
02	07	01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	12 Dokumen	83.440.800	APBD		12 Dokumen	89.281.656
02	07	01	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	12 Laporan	60.232.400	APBD		12 Laporan	64.448.668
02	07	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	12 Bulan	204.488.400	APBD		12 Bulan	267.899.588
02	07	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Makassar	110 Paket	75.000.000	APBD		110 Paket	80.250.000
02	07	01	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	12 Dokumen	60.488.400	APBD		12 Dokumen	64.722.588
02	07	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar	10 Orang	69.000.000	APBD		10 Orang	73.830.000
02	07	01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	0 Orang	0	APBD		0 Orang	49.097.000
02	07	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	Kota Makassar	7 Jenis	998.941.840	APBD		7 Jenis	1.068.867.769
02	07	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	1 Paket	10.560.100	APBD		1 Paket	11.299.307
02	07	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	6 Paket	68.812.200	APBD		6 Paket	73.629.054
02	07	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	2 Paket	56.204.540	APBD		2 Paket	60.138.858
02	07	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Makassar	3 Paket	19.465.000	APBD		3 Paket	20.827.550
02	07	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Makassar	12 Dokumen	19.500.000	APBD		12 Dokumen	20.865.000
02	07	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	66 Laporan	420.000.000	APBD		66 Laporan	449.400.000
02	07	01	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kota Makassar	12 Dokumen	404.400.000	APBD		12 Dokumen	432.708.000
02	07	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		12 Unit	216.466.750	APBD		12 Unit	231.619.423
02	07	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Makassar	3 Unit	30.000.000	APBD		3 Unit	32.100.000
02	07	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar	9 Unit	186.466.750	APBD		9 Unit	199.519.423
02	07	01	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Makassar	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0

02	07	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	12 Laporan	648.055.784	APBD		12 Laporan	693.419.689
02	07	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	12 Laporan	180.357.200	APBD		12 Laporan	192.982.204
02	07	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar	12 Laporan	328.443.084	APBD		12 Laporan	351.434.100
02	07	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	3 Laporan	139.255.500	APBD		3 Laporan	149.003.385
02	07	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	63 Unit	573.756.750	APBD		63 Unit	613.919.723
02	07	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar	1 Unit	40.759.200	APBD		1 Unit	43.612.344
02	07	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar	15 Unit	306.757.550	APBD		15 Unit	328.230.579
02	07	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Makassar	46 Unit	36.050.000	APBD		46 Unit	38.573.500
02	07	01	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Makassar	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0
02	07	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Makassar	1 Unit	190.190.000	APBD		1 Unit	203.503.300
02	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	KOTA MAKASSAR	93,55 PERSEN	231.508.000	APBD		93,55 PERSEN	247.713.560
02	07	02	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	2 Dokumen	231.508.000	APBD		2 Dokumen	247.713.560
02	07	02	01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	1 Dokumen	156.666.000	APBD		1 Dokumen	167.632.620
02	07	02	01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kota Makassar	50 Perusahaan	74.842.000	APBD		50 Perusahaan	80.080.940
02	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	KOTA MAKASSAR	0,70 PERSEN	3.508.303.100	APBD		0,70 PERSEN	3.753.884.317
					TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			21,50 PERSEN				21,50 PERSEN	
					JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKILL TRAINING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN			1.000 ORANG				1.000 ORANG	
02	07	03	01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	Kota Makassar	676 Orang	2.336.805.500	APBD		676 Orang	2.500.381.885
02	07	03	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	Kota Makassar	676 Orang	2.300.590.000	APBD		676 Orang	2.461.631.300
02	07	03	01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	Kota Makassar	50 Lembaga	36.215.500	APBD		50 Lembaga	38.750.585
02	07	03	02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Makassar	30 Lembaga	151.996.000	APBD		30 Lembaga	162.635.720

02	07	03	02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Makassar	80 Lembaga	151.996.000	APBD		80 Lembaga	162.635.720
02	07	03	03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Makassar	20 Perizinan	183.000.400	APBD		20 Perizinan	195.810.428
02	07	03	03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Makassar	24 Perizinan	183.000.400	APBD		24 Perizinan	195.810.428
02	07	03	04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kota Makassar	200 Perusahaan	609.156.000	APBD		200 Perusahaan	651.796.920
02	07	03	04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kota Makassar	200 Perusahaan	609.156.000	APBD		200 Perusahaan	651.796.920
02	07	03	05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	Kota Makassar	4 Dokumen	227.345.200	APBD		4 Dokumen	243.259.364
02	07	03	05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Makassar	4 Dokumen	227.345.200	APBD		4 Dokumen	243.259.364
02	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR	KOTA MAKASSAR	60,00 PERSEN	1.257.346.780	APBD		60,00 PERSEN	1.345.361.055
					JUMLAH PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU			8.640 PELUANG KERJA				8.640 PELUANG KERJA	
02	07	04	01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Pelayanan Antarkerja	Kota Makassar	12 Bulan	621.125.080	APBD		12 Bulan	664.603.836
02	07	04	01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi		33 Orang	47.127.000	APBD		33 Orang	50.425.890
02	07	04	01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Makassar	1.500 Orang	82.877.500	APBD		1.500 Orang	88.678.925
02	07	04	01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Makassar	100 Orang	25.269.000	APBD		100 Orang	27.037.830
02	07	04	01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kota Makassar	50 Orang	69.828.200	APBD		50 Orang	74.716.174
02	07	04	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	180 Orang	396.023.380	APBD		180 Orang	423.745.017
02	07	04	02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Kota Makassar	6 Lembaga	84.638.600	APBD		6 Lembaga	90.563.302
02	07	04	02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kota Makassar	6 Lembaga	42.453.600	APBD		6 Lembaga	45.425.352
02	07	04	02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Kota Makassar	4 Lembaga	42.185.000	APBD		4 Lembaga	45.137.950
02	07	04	03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	12 Bulan	453.906.200	APBD		12 Bulan	485.679.634
02	07	04	03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar	Kota Makassar	12 Dokumen	42.767.600	APBD		12 Dokumen	45.761.332
02	07	04	03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Makassar	3.000 Orang	46.109.600	APBD		3.000 Orang	49.337.272

02	07	04	03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job	Kota Makassar	500 Orang	365.029.000	APBD		500 Orang	390.581.030
02	07	04	04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan	Kota Makassar	140 Orang	97.676.900	APBD		140 Orang	104.514.283
02	07	04	04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Makassar	100 Orang	25.310.000	APBD		100 Orang	27.081.700
02	07	04	04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kota Makassar	20 Orang	72.366.900	APBD		20 Orang	77.432.583
02	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	KOTA MAKASSAR	33,69 PERSEN	1.068.344.400	APBD		33,69 PERSEN	1.143.128.508
					ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN			4,14 PERSEN				4,14 PERSEN	
					PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)			74,00 PERSEN				74,00 PERSEN	
02	07	05	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	35 Perusahaan	43.695.700	APBD		35 Perusahaan	46.754.399
02	07	05	01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Makassar	20 Perusahaan	1.708.000	APBD		20 Perusahaan	1.827.560
02	07	05	01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	15 Perusahaan	1.280.000	APBD		15 Perusahaan	1.369.600
02	07	05	01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Makassar	12 Laporan	40.707.700	APBD		12 Laporan	43.557.239
02	07	05	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	270 Perkara	1.024.648.700	APBD		270 Perkara	1.096.374.109
02	07	05	02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Makassar	70 Perkara	127.582.000	APBD		70 Perkara	136.512.740
02	07	05	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Makassar	200 Perkara	174.318.400	APBD		200 Perkara	186.520.688
02	07	05	02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Makassar	Asosiasi dan 2 Serikat Pekerja	21.966.000	APBD		Asosiasi dan 2 Serikat Pekerja	23.503.620

02	07	05	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Makassar	12 Lembaga	336.630.800	APBD		12 Lembaga	360.194.956
02	07	05	02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	100 Orang	364.151.500	APBD		100 Orang	389.642.105

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA

Arah kebijakan dan strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tahun 2022-2026 disusun untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Sombere Dan Smart City Dengan Imunitas Kuat Untuk Semua” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan serta upaya dalam pencapaian Misi 2 (kedua) Kota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua” pada tujuan 2.2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru. Arah kebijakan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas RPJMD 2022-2026 Kota Makassar yang mencakup bidang ketenagakerjaan

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 5 (lima) program dimana terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama (1), merupakan program yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian program strategis Walikota Makassar antara lain :

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja merupakan implementasi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dalam

mewujudkan Program Strategis Walikota Terpilih “10.000 Skill Training Gratis” dan “Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, keterampilan, keahlian dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. Sehingga dengan peningkatan kualitas tenaga kerja diharapkan dapat mendorong tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja.

Pada program ini disusun dengan 3 (tiga) indikator kinerja program sebagai berikut :

- 1) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, dengan indikator ini dapat diukur besaran tenaga kerja Kota Makassar yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi. Pada tahun 2023 di targetkan 0,70 persen tenaga kerja bersertifikat kompetensi;
- 2) Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja, indikator ini untuk mengukur rata-rata tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu. Pada tahun 2023 di targetkan sebesar 21,50 persen Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja;
- 3) Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan, indikator ini untuk mengetahui distribusi Dinas Ketenagakerjaan dalam Program Strategis Walikota dan Wakil Walikota Makassar “10.000 Skill Training Gratis. Pada tahun 2023 di targetkan sebanyak 1.000 peserta skill training gratis.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja merupakan implementasi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan Misi 2 (kedua) Walikota dan Wakil Walikota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan

imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua” pada tujuan 2 (kedua) “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi” dan sasaran 2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru dalam Program Strategis “Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru”.

Program ini bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik sektor formal maupun sektor informal secara remunerative, produktif, layak dan sejahtera baik dalam maupun di luar negeri.

Pada program ini disusun dengan 2 (dua) indikator kinerja program sebagai berikut :

- 1) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar, indikator ini untuk mengukur besaran penempatan tenaga kerja Kota Makassar melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar. Pada tahun 2023 di targetkan 60,00 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar;
- 2) Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru, indikator ini untuk mengetahui distribusi Dinas Ketenagakerjaan dalam Program Strategis Walikota dan Wakil Walikota Makassar “Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru. Pada tahun 2023 di targetkan 8.640 kemudahan akses peluang kerja dan bisnis baru.

2. Prioritas Kedua (2), merupakan program yang secara tidak langsung mendukung program strategis Walikota dan merupakan perwujudan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Perencanaan Tenaga Kerja merupakan implementasi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dalam menunjang pencapaian Misi 1 dan Misi ke 2 Pemerintah Kota Makassar.

Program ini merupakan proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Pada program ini disusun dengan 1 (tiga) indikator kinerja program yaitu Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja. Indikator tersebut untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan mengacu pada Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro. Pada tahun 2023 di targetkan 93,55 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja.

b. Program Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk perbaikan syarat kerja dan sistim pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja/pengusaha.

Pada program ini disusun dengan 3 (tiga) indikator kinerja program sebagai berikut :

- 1) Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak. Pada tahun 2023 di targetkan 33,69 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak;
- 2) Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun. Pada tahun 2023 di targetkan 4,14 persen Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun;
- 3) Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Pada tahun 2023 di targetkan 74,00 persen Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB).

3. Penunjang, merupakan program penunjang urusan pemerintahan daerah antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai penunjang urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan demi terciptanya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Pada program ini disusun dengan 3 (tiga) indikator kinerja program sebagai berikut :

- 1) Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik.
Pada tahun 2023 di targetkan 90,00 persen Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik ;
- 2) Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 di targetkan 100,00 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- 3) Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas. Pada tahun 2023 di targetkan 90,00 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur Dinas Ketenagakerjaan telah menyusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Peta Proses Bisnis Dinas Ketenagakerjaan menggunakan format BPMN (Business Process Modeling and Notation sebagaimana tertuang pada gambar berikut:



4.2. PENDANAAN

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 direncanakan dalam 5 (lima) program terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2023, adalah : Rp. 16,399,301,944,- (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dimana dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) usulan kegiatan yang terakomodir oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) usulan kegiatan;
4. Rumusan kegiatan mengalami perubahan dari rancangan awal RKPD Tahun 2023 Kota Makassar;

BAB 5

PENUTUP

5.1. CATATAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2023. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyusun Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada RKPD Kota Makassar tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya Saing, harmonis dan sejahtera. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2023, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar, Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap

keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2022 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja sesuai indikator dapat tercapai.
4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.
5. Penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 72 Telp. / Fax. (0411) 853930 Makassar 90222
Email : disnaker_makassar@gmail.com Homepage : <http://www.makassar.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 4132/DISNAKER/560/XII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

- Menetapkan : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2025;

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Desember 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR



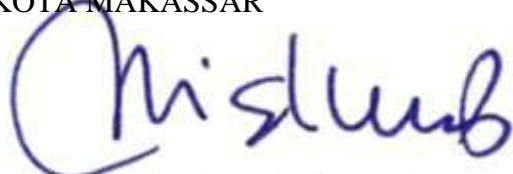
NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP : 19651210 199112 2 001

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 4132/DISNAKER/560/XII/2021
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA
 MAKASSAR TAHUN 2022-2026

No.	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Hasil Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia	$RKJ = \frac{\sum \text{Penduduk yang bekerja}}{\sum \text{Penduduk usia + 15 thn}} \times 100\%$
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Hasil Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia	$TPTk = \frac{PDRB \text{ (harga konstan)}}{\sum \text{Penduduk yang bekerja}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Data Perselisihan Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial • Data Wajib Lapor Perusahaan 	$\text{Angka Sengketa} = \frac{\sum \text{Kasus perselisihan HI yang dilaporkan}}{\sum \text{Perusahaan di Kota Makassar}} \times 100\%$
3	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan oleh Inpektorat Kota Makassar

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
 KOTA MAKASSAR



NIELMA PALAMBA, SH. M.AP
 Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
 NIP : 19651210 199112 2 001



LAMPIRAN 2

LAPORAN HASIL REVIU APIP



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR INSPEKTORAT

Jalan Teduh Bersinar No. 07 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar Kode Pos : 90224
Telepon. (0411) 881550, Fax. (0411) 8215755
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com

LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

NOMOR : 0122/Insp/780.04/VIII/2022
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

Daftar Isi	Halaman
I. Ringkasan Eksekutif	(2)
II. Dasar Hukum	(3)
III. Tujuan Reviu	(4)
IV. Ruang Lingkup Reviu	(4)
V. Metodologi Reviu	(5)
VI. Gambaran Umum	(5)
VII. Uraian Hasil Reviu	(7)
VIII. Apresiasi	(12)

Lampiran:

1. Formulir Simpulan atas Status Rekomendasi;
2. Catatan Hasil Reviu (CHR).



LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2023

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Renja, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kepentingan. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
2. Sesuai instruksi pimpinan, Inspektorat Daerah Kota Makassar telah melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023. Adapun reviu dilaksanakan paralel dengan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar setelah ditetapkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023, telah didukung dengan kelengkapan dokumen antara lain sebagai berikut:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
 - b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d. 2026;



- c. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun sebelumnya (Tahun 2021) telah ditandatangani namun belum dilengkapi tanggal;
 - d. Berita Acara Forum Perangkat Daerah;
 - e. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan.
2. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah namun belum dilengkapi tanggal, telah disajikan dengan sistematika sesuai ketentuan dalam Pasal 129 dan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
 3. Rumusan sasaran perangkat daerah dalam Bab III Rancangan Akhir Renja PD telah sesuai dengan rumusan sasaran pada Bab IV RKPD.
 4. Pencantuman tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Bab III Renja PD diyakini telah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Bab II.
 5. Kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program Renja PD dan Renstra PD.

Catatan Hasil Reviu (CHR) rancangan akhir Renja-PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 telah diterima oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada tanggal 28 Juli 2022. Dari hasil reviu tersebut di atas, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar telah menyampaikan tanggapan atas Catatan Hasil Reviu (CHR) berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nomor 1650/DISNAKER/560/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 telah ditandatangani dan telah dilengkapi dengan tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana terlampir;
2. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya (Tahun 2021) telah ditandatangani dan telah dilengkapi dengan tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana terlampir.

Dinas Ketenagakerjaan telah menyampaikan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang ditandatangani dan dilengkapi dengan tanggal 15 Juli 2022 serta Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya (Tahun 2021) yang ditandatangani dan dilengkapi dengan tanggal 18 Januari 2022.



INSPEKTORAT

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ Tanggal 3 Juni 2022 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 adalah untuk memastikan bahwa dokumen Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar meliputi:

1. Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD dengan Rancangan Akhir RKPD;
2. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB pada Rancangan Akhir Renja-PD.

Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.



INSPEKTORAT

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ Tanggal 3 Juni 2022 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023.
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 serta melaksanakan wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait dengan proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Makassar nomor 093/ST-Reviu/Insp/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab : A. Asma Zulistia Ekayanti, S.E., M.M.

Wakil Penanggungjawab : Lasmana, S.I.P., M.H.

Pengendali Teknis : Drs. Arwin Dachlan, M.Si.

Ketua Tim : A. Muh. Akmal Malla, S.E.

Anggota Tim : 1. Hadidjah, S.Sos.

2. Nurmiati, S.E.

3. Hj. Hamsinah, S.E.

4. Sulfiadi, S.T.

5. Andi Astina, S.E.

6. A. Fitriani Said, S.H.

7. Yasser, S.E.

8. Rahayu Amaliah, S. Psi.

9. Diah Citra Astuti, S.E.

Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dilaksanakan selama 8 (delapan) hari mulai tanggal 21 Juli s.d. 1 Agustus 2022.

VI. GAMBARAN UMUM

1. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perwali tentang RKPD.



2. Langkah kerja reviu rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 terdiri dari:
 - a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja PD dengan RKPD, meliputi:
 - 1) Mendapatkan Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan reviu rancangan akhir Renja PD;
 - 2) Meyakinkan perangkat daerah telah menyusun Renja PD;
 - 3) Meyakinkan rumusan sasaran perangkat daerah dalam Bab III Rancangan Akhir Renja PD telah sesuai dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam RKPD.
 - b. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB pada Rancangan Akhir Renja-PD, meliputi:
 - 1) Meyakinkan tujuan dan sasaran Renja, Program dan Kegiatan pada Bab III Renja PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II;
 - 2) Meyakinkan kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program Renja PD dan Renstra PD.
3. Dalam melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dibutuhkan beberapa dokumen pendukung antara lain:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
 - b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d. 2026;
 - c. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya;
 - d. Berita Acara Forum Perangkat Daerah;
 - e. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - f. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri teknis terkait Standar Pelayanan Minimal (jika ada).
4. Program dan Kegiatan berdasarkan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar diuraikan sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 8 (delapan) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja yang terdiri atas kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
- c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri atas 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
 - 2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - 3) Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 4) Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
 - 5) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - 4) Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

VII. URAIAN HASIL REVIU

Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023, mengungkapkan kondisi reviu sebagai berikut:

1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja PD dengan RKPD

- a. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023, telah didukung dengan kelengkapan dokumen antara lain sebagai berikut:



- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d. 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 3) Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya (Tahun 2021) telah ditandatangani namun belum dilengkapi tanggal;
- 4) Berita Acara Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan dihadiri oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada tanggal 8 Maret 2022 di Hotel Karebosi Premier;
- 5) Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA Kota Makassar pada tanggal 9 Mei 2022.

Namun terdapat 2 (dua) dokumen yang tidak disampaikan yaitu:

- 1) Peraturan Menteri teknis terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tidak termasuk Perangkat Daerah yang terkait dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 2) Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah. Berita Acara tersebut tidak dilampirkan karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 307 menyatakan bahwa:
 - a) Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan;
 - b) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat a), meliputi:
 - (1) Koordinasi teknis pembangunan tingkat pusat; dan
 - (2) Koordinasi teknis pembangunan tingkat daerah provinsi.



INSPEKTORAT

Atas hasil revidi diatas, Dinas Ketenagakerjaan telah melampirkan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya (Tahun 2021) yang ditandatangani dan dilengkapi dengan tanggal 18 Januari 2022.

- b. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah namun belum dilengkapi dengan tanggal telah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- 3) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- 4) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- 5) Penutup.

Sistematika tersebut telah sesuai dengan Pasal 129 dan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Atas hasil revidi, Dinas Ketenagakerjaan telah melampirkan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang ditandatangani dan dilengkapi dengan tanggal 15 Juli 2022.

- c. Hasil pengujian Kesesuaian rumusan sasaran perangkat daerah dalam Bab III Rancangan Akhir Renja PD dengan rumusan sasaran pada Bab IV RKPD menunjukkan bahwa rumusan sasaran perangkat daerah pada Rancangan Akhir Renja PD telah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam RKPD sebagai berikut:

No	Sasaran Perangkat Daerah Dalam Rancangan Akhir Renja PD	Sasaran pada RKPD	Keterangan
1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Sasaran 2.2.1: Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru	Sasaran tercantum pada: - Misi 2 yaitu Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk semua - Misi 1 yaitu Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih Dari Indikasi Korupsi, Tujuan 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	Sasaran 1.2.1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sombere dan Smart	
3	Tersedianya Administrasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan		



INSPEKTORAT

2. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB pada Rancangan Akhir Renja-PD

- a. Pengujian Kesesuaian Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renja PD dengan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Hasil Pengujian menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Bab III Renja PD diyakini telah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Bab II dengan uraian sebagai berikut:

No	Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Renja PD	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Bab II Rancangan Akhir Renja PD
1	Tujuan	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Dinas Ketenagakerjaan: 1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia 2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan 3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial
a	Mewujudkan kemudahan akses peluang kerja dan bisnis baru	
b	Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja	
c	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	
2	Sasaran	
a	Tersedianya peluang kerja yang didukung oleh kualitas tenaga kerja	
b	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja	
c	Tersedianya Administrasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



INSPEKTORAT

No	Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Renja PD	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Bab II Rancangan Akhir Renja PD
4	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
a	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
b	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
c	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
d	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
e	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
a	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
b	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
c	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
d	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
a	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
b	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	

- b. Pengujian Kesesuaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Kinerja Program Renja PD dan Renstra PD

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja kegiatan/sub kegiatan diyakini telah mendukung kinerja program Renja PD dan Renstra PD.



INSPEKTORAT

VIII. APRESIASI

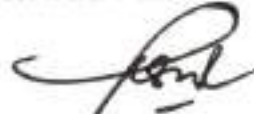
Inspektorat Daerah Kota Makassar menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023.

**Mengetahui,
INSPEKTUR**



A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, SE., M.M.
Pangkat: Pembina
NIP. 19840203 200604 2 011

WAKIL PENANGGUNG JAWAB



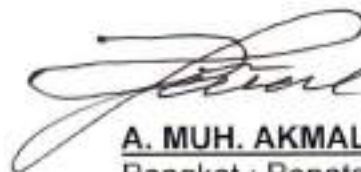
LASMANA, S.I.P., M.H.
Pangkat : Pembina
NIP : 19720917 199303 1 003

PENGENDALI TEKNIS



Drs. ARWIN DACHLAN, M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19710822 199202 1 001

KETUA TIM



A. MUH. AKMAL MALLA, S.E.
Pangkat : Penata
NIP : 19820707 200901 1 007





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR INSPEKTORAT

Jalan Teduh Bersinar No. 07 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar Kode Pos : 90224
Telepon: (0411) 881550, Fax: (0411) 8215755
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: 093/ST-Reviu/Insp/VII/2022

Berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 467/700.05/Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022, Inspektur Kota Makassar memberikan tugas kepada :

No.	Nama	Jabatan
1.	A. Asma Zulistia Ekayanti, SE., MM	Penanggung Jawab
2.	Lasmana, S.I.P., M.H	Wakil Penanggung Jawab
3.	Drs. Arwin Dachlan, M.Si	Pengendali Teknis
4.	Andi Muhammad Akmal Malla, SE	Ketua Tim
5.	Hadidjah, S.Sos	Anggota Tim
6.	Nurmiati, SE	Anggota Tim
7.	Hj. Hamsinah, SE	Anggota Tim
8.	Sulfiadi, ST	Anggota Tim
9.	Andi Astina, SE	Anggota Tim
10.	A. Fitriani Said, SH	Anggota Tim
11.	Yasser, SE	Anggota Tim
12.	Rahayu Amaliah, S.Psi	Anggota Tim
13.	Diah Citra Astuti, SE	Anggota Tim

untuk melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kota Makassar Tahun 2023 selama 8 (delapan) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Juli s.d. 1 Agustus 2022, pada :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar;
2. Dinas Kesehatan Kota Makassar;
3. Dinas Perhubungan Kota Makassar;
4. Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
6. Dinas Perdagangan Kota Makassar;
7. Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
9. Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
10. Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
11. Kecamatan Mariso Kota Makassar;
12. Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Makassar, 19 Juli 2022

INSPEKTUR,

A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, SE., MM

Pangkat : Pembina

NIP. 19840203 200604 2 011

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Makassar (sebagai Laporan) di Makassar;
2. Arsip.

Keputusan Inspektur Nomor 3638/Insp/700/2018 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Kota Makassar: Aturan Perilaku Nomor 7 Huruf b "Auditor, P2UPD, Audiwan dan PNS tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya"

Lampiran 1 Laporan Hasil Reviu Renja-PD

Formulir Simpulan atas Status Rekomendasi Reviu Renja-PD

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Tahun 2023

No	Langkah Kerja	Catatan Hasil Reviu			Tindak Lanjut Pimpinan OPD	Simpulan Atas Tindak Lanjut	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Rekomendasi		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja-PD dengan rancangan akhir RKPD						
a	Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya (Tahun 2021) telah ditandatangani namun belum dilengkapi tanggal;		√	Melengkapi dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya (Tahun 2021) dengan mencantumkan tanggal lengkap	Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nomor 1650/DISNAKER/560/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang menjelaskan bahwa dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya (Tahun 2021) telah ditandatangani dan telah dilengkapi dengan tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana terlampir. Penjelasan tersebut dibuktikan dengan lampiran dokumen Laporan Evaluasi yang telah diperbaiki dengan mencantumkan tanggal yaitu tanggal 18 Januari 2022	√	
b	Pengujian atas penyusunan Renja -PD Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa Dinas Ketenagakerjaan telah menyusun rancangan akhir Renja-PD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan namun belum lengkap mencantumkan tanggal		√	Melengkapi dokumen Rancangan Akhir Renja PD dengan mencantumkan tanggal lengkap	Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nomor 1650/DISNAKER/560/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang menjelaskan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 telah ditandatangani dan telah dilengkapi dengan tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana terlampir. Penjelasan tersebut dibuktikan dengan lampiran dokumen Rancangan Akhir Renja PD yang telah diperbaiki dengan mencantumkan tanggal yaitu tanggal 15 Juli 2022	√	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR INSPEKTORAT

Jalan Teduh Bersinar No. 07 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar Kode Pos : 90224
Telepon. (0411) 881550, Fax. (0411) 8215755
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com

CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (Renja-PD) DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

Inspektorat Daerah Kota Makassar	Disusun oleh/Tanggal	Rahayu Amaliah / 08/ 27 Juli 2022
	Diteliti oleh/Tanggal	A. Muh. Akmal Malla / 28 Juli 2022
	Disetujui oleh/Tanggal	Drs. Arwin Dachlan, M.Si / 28 Juli 2022

Sehubungan dengan penugasan Inspektur Kota Makassar berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor 093/ST-Reviu/Insp/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 untuk melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kota Makassar Tahun 2023, dengan ini disampaikan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 sebagai berikut:

I. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu meliputi pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja-PD Tahun 2023 dengan rancangan akhir RKPD Tahun 2023 serta pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan akhir Renja-PD Tahun 2023 sesuai fokus reviu yang tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/LJ Tanggal 03 Juni 2022 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja-PD dengan rancangan akhir RKPD terdiri dari :
 - a) Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung;
 - b) Pengujian atas penyusunan Renja-PD
 - c) Pengujian kesesuaian rumusan sasaran perangkat daerah dalam BAB III rancangan akhir Renja-PD dengan sasaran pada BAB IV rancangan akhir RKPD.



INSPEKTORAT

2. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB pada rancangan akhir Renja-PD terdiri dari :
 - a) Pengujian tujuan dan sasaran Renja-PD, program dan kegiatan pada BAB III Renja-PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada BAB II;
 - b) Pengujian kinerja kegiatan/sub kegiatan dalam mendukung kinerja program Renja-PD dan Renstra-PD

II. Uraian Catatan Hasil Reviu

Hasil reviu terhadap rancangan akhir Renja-PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 sebagai berikut:

A. Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Renja-PD Dengan Rancangan Akhir RKPD

1. Pengujian Kelengkapan Dokumen Pendukung

Berdasarkan hasil pengujian kelengkapan dokumen pendukung diketahui bahwa dari 8 (delapan) kelengkapan dokumen yang dibutuhkan terdapat 6 (enam) dokumen yang telah diserahkan ke Tim Reviu Renja-PD Inspektorat Kota Makassar yaitu;

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
2. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 telah ditandatangani **namun belum dilengkapi dengan tanggal**;
3. Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 28 September 2021;
4. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya (Tahun 2021) telah ditandatangani **namun belum dilengkapi dengan tanggal**;
5. Berita Acara Forum Perangkat Daerah ditandatangani pada Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, LPTM, HWDI, SPSI, PT. Sumber Alfaria Trijaya dan BKK SMK 6 Makassar;
6. Dokumen Hasil Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah yang di tandatangani oleh Kepala Bappeda Kota Makassar pada tanggal 9 Mei 2022;



INSPEKTORAT

Selain hal tersebut di atas terdapat 2 (dua) kelengkapan dokumen yang tidak disampaikan dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Peraturan Menteri teknis terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dinas Ketenagakerjaan tidak termasuk Perangkat Daerah yang terkait dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 307 menyatakan bahwa;
 - (1) Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan;
 - (2) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kordinasi teknis pembangunan tingkat pusat; dan
 - b. kordinasi teknis pembangunan tingkat Daerah provinsi.Dengan demikian Berita Acara tersebut tidak dilampirkan karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

TANGGAPAN:

2. Pengujian atas Penyusunan Renja-PD

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa Dinas Ketenagakerjaan telah menyusun rancangan akhir Renja-PD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- 3) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- 4) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- 5) Penutup.

3. Pengujian Kesesuaian Rumusan Sasaran Perangkat Daerah Dalam BAB III Rancangan Akhir Renja-PD Dengan Sasaran pada BAB IV Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian rumusan sasaran perangkat daerah dalam BAB III rancangan akhir Renja-PD dengan sasaran pada BAB IV rancangan akhir RKPD, diketahui bahwa rumusan sasaran perangkat daerah



INSPEKTORAT

pada rancangan akhir Renja-PD telah sesuai dengan sasaran perangkat daerah pada rancangan akhir RKPD.

Adapun sasaran perangkat daerah yang disebutkan dalam BAB III rancangan akhir Renja-PD Dinas Ketenagakerjaan yaitu;

1. Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja.
3. Tersedianya Administrasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan

Rumusan sasaran tersebut telah berkesesuaian dengan sasaran yang tercantum pada Bab IV RKPD yaitu pada;

1. Misi ke-1 "Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi" pada Tujuan ke-2 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif " dengan Sasaran "Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sombere' dan Smart."
2. Misi ke-2 "Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk semua" pada Tujuan ke-2 yaitu "Meningkatkan Pendapatan Masyarakat secara Merata" dengan sasaran "Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru".

B. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar BAB Rancangan Akhir Renja-PD

1. Pengujian Tujuan dan Sasaran Renja-PD, Program dan Kegiatan pada BAB III Renja-PD Didasarkan pada Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II.

Dari hasil pengujian terhadap tujuan dan sasaran Renja-PD, program dan kegiatan pada BAB III Renja-PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada BAB II diketahui bahwa tujuan dan sasaran Renja-PD, serta program dan kegiatan Renja-PD telah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.



INSPEKTORAT

2. Pengujian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam Mendukung Kinerja Program Renja-PD dan Renstra-PD

Dari hasil pengujian terhadap kinerja kegiatan/sub kegiatan dalam mendukung kinerja program Renja-PD dan Renstra-PD diketahui bahwa kinerja kegiatan/sub kegiatan dalam mendukung kinerja program Renja-PD telah sesuai dengan Renstra-PD.



Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar,

NIELMA PALAMBA, SH., M.AP
NIP. 19651210 199112 2 006

Makassar, 28 Juli 2022
Anggota Tim Reviu,

RAHAYU AMALIAH
NIP. 19820913 201503 2001

